

Laporan Kinerja TRIWULAN III Tahun 2024



**DIREKTORAT JASA KELAUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, Laporan Kinerja (LKJ) Direktorat Jasa Kelautan Triwulan III Tahun 2024 telah selesai disusun. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Jasa Kelautan dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan selama Triwulan III Tahun 2024 ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jasa Kelautan.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan diucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Oktober 2024

Direktur Jasa Kelautan



Dr. Miftahul Huda

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jasa Kelautan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Kelautan dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Kinerja DJPRL terdiri atas 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja (IK), total 20 indikator.

Semua indikator kinerja Triwulan III Tahun 2024 yang tercapai dengan baik, melebihi target dengan rincian sebagai berikut:

1. IKU 12 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 29% tercapai 29,53% atau sebesar 101,83%,
2. IKU 15 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 3 dokumen tercapai 3 dokumen atau sebesar 100%,
3. IKU 16 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dengan target 94% tercapai 133,33% atau sebesar 120%,
4. IKU 17 Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan dengan target 80% tercapai 87,8% atau sebesar 109,75%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1. PENJELASAN UMUM ORGANISASI.....	5
1.2. PELAKSANAAN URUSAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JASA KELAUTAN. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	5
1.3. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT JASA KELAUTAN 2024.....	8
2.2. PERJANJIAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	12
3.1.1. IKU 1 PERSENTASE PENDATAAN PERGARAMAN YANG DILAKSANAKAN (%).....	14
3.1.2. IKU 2 TENAGA KERJA YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN PENATAAN DAN PEMANFAATAN JASA KELAUTAN (ORANG)	15
3.1.3. IKU 3 NILAI PNBP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (RP).....	20
3.1.4. IKU 4 SARANA PRODUKSI BIOFARMAKOLOGI YANG DIBANGUN (UNIT).....	21
3.1.5. IKU 5 LOKASI YANG TERFASILITASI PEMANFAATAN PESISIR DAN LAUT YANG DIKELOLA UNTUK BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT (LOKASI)	26
3.1.6. IKU 6 LOKASI YANG TERFASILITASI PENGELOLAAN REKLAMASINYA (LOKASI)	32
3.1.7. IKU 7 LOKASI YANG TERFASILITASI PENGELOLAAN PERAIRAN (LOKASI).....	34
3.1.8. IKU 8 SARANA/PRASARANA DI SENTRA EKONOMI GARAM YANG DIBANGUN (UNIT).....	39
2.1.9. IKU 9 LAHAN GARAM RAKYAT YANG DIFASILITASI (HA)	42
2.1.10. IKU 10 KAWASAN YANG DIBANGUN SARANA PRASARANA WISATA BAHARI (KAWASAN)	44
2.1.11. TABEL 10. CAPAIAN IKU KAWASAN YANG DIBANGUN SARANA PRASARANA WISATA BAHARI (KAWASAN)	44
3.1.11. IKU 11 KAWASAN YANG DIBANGUN SARANA PRASARANA BMKT (KAWASAN)	45
3.1.12. IKU 12 PERSENTASE REALISASI ANGGARAN LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (%).....	49
3.1.13. IKU 13 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (INDEKS)	50
3.1.14. IKU 14 NILAI PM SAKIP LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (NILAI).....	53
3.1.15. IKU 15 LAPORAN SPIP YANG DISUSUN LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (DOKUMEN)	55
3.1.16. IKU 16 PERSENTASE UNIT KERJA LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR (%).....	56
3.1.17. IKU 17 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN (%).....	57
3.1.18. IKU 18 PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (%).....	58
3.1.19. IKU 19 TINGKAT EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (%)	60
3.1.20. IKU 20 NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (NILAI) ...	62
TABEL 22. CAPAIAN IKU NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (NILAI).....	63
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	64
BAB IV PENUTUP.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	9
Tabel 2 Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan (orang).....	19
Tabel 3 Rekap Tenaga Kerja yang Terlibat pada Kegiatan Direktorat Jasa Kelautan	19
Tabel 4 Capaian IKU Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp. 000) Triwulan III Tahun 2024	21
Tabel 5 capaian IKU Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (unit)	24
Tabel 6 capaian IKU <i>Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut</i>	26
Tabel 7 capaian IKU Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (lokasi)	33
Tabel 8 capaian IKU Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (lokasi).....	39
Tabel 9 Capaian IKU Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang Dibangun (unit)	41
1.1.11. Tabel 10. Capaian IKU Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan).....	44
Tabel 12. Capaian IKU <i>Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)</i>	47
Tabel 14. Capaian IKU Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan.....	50
Tabel 15. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)	52
Tabel 16. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai).....	54
Tabel 17. Capaian IKU Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)	55
Tabel 18. Capaian IKU Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%).....	56
Tabel 19. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%).....	58
Tabel 20. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	59
Tabel 21. Capaian IKU Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%).....	61
Tabel 22. Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai).....	63

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. *Penjelasan Umum Organisasi*

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi.

Direktorat Jasa Kelautan memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pendayagunaan pulau-pulau kecil. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam. Direktorat Jasa Kelautan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- b) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- c) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;

1.2. *Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Kelautan. Aspek Strategis Organisasi*

Struktur Organisasi Direktorat Jasa Kelautan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jasa Kelautan adalah sebagai berikut:



1.3. Isu Strategis Organisasi

Pada saat ini, Direktorat Jasa Kelautan memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. DJPRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) melalui website: <http://sihandal.kkp.go.id>.
2. Terkait permasalahan garam, saat ini masih dibutuhkan sarana/prasarana pengembangan usaha garam yang memadai terutama di wilayah timur Indonesia karena wilayah ini sangat potensial dikembangkan usaha garam rakyat.
3. Permasalahan pengembangan dan pengelolaan Wisata Bahari, dikarenakan belum optimal 3A (atraksi, amenitas/infrastruktur dan aksesibilitas). Selain itu juga dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang handal, dan tata kelola wisata yang kurang mendukung, khususnya terkait sinergitas antar pemangku kepentingan.
4. Permasalahan Biofarmakologi terkait produk berbahan baku biota laut masih kalah dengan produk terestrial sehingga harganya mahal dan cara mengolahnya lebih rumit. Oleh karena itu perlu campur tangan pemerintah untuk mengembangkan produk kosmetika, nutrasetika dr bahan laut
5. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan, perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil di Indonesia;
6. Perlu peningkatan tata kelola bangunan dan instalasi laut;
7. Perlunya peningkatan manfaat sumber daya lahan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui reklamasi dan/atau wisata bahari;

8. Perlu peningkatan pemanfaatan air laut, biofarmakologi laut, bioteknologi laut dan produk turunannya;
9. Belum terkelolanya wisata bahari yang lestari dan berkelanjutan;
10. Perlu tata kelola BMKT untuk peningkatan manfaat ekonomi dan pendidikan;
11. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya non konvensional untuk peningkatan nilai ekonomi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jasa Kelautan 2024

Sasaran kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pertama (SS-1): Terlaksananya Pendataan Pergaraman dengan indikator Kinerja Utama:
 - a. Persentase Pendataan Pergaraman yang dilaksanakan (%)
2. Sasaran Strategis Kedua (SS-2): Meningkatnya Tenaga Kerja yang terlibat dalam kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa Kelautan (orang)
3. Sasaran Strategis Ketiga (SS-3): Meningkatnya Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp.000):
4. Sasaran Strategis Keempat (SS-4): Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (Unit):
5. Sasaran Strategis Kelima (SS-5): Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut (lokasi):
6. Sasaran Strategis Keenam (SS-6): Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Lokasi yang terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (Lokasi)
7. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-7): Terfasilitasinya Pengelolaan Perairan dengan Indikator Kinerja Utama;
 - a. Lokasi yang terfasilitasi pengelolaan Perairan (Lokasi):
8. Sasaran Strategis Kedelapan (SS-8): Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas Garam dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Sarana/Prasarana Garam Yang Dibangun (Unit)
9. Sasaran Strategis Kesembilan (SS-9): Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi dengan Indikator Kinerja Utama;
 - a. Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi (Ha)

10. Sasaran Strategis Kesepuluh (SS-10): Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT dengan Indikator Kinerja Utama:
- Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan);
 - Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)
11. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-11): Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Jasa Kelautan dengan Indikator Kinerja Utama:
- Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Jasa Kelautan (%)
 - Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)
 - Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)
 - Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)
 - Persentase unit kerja Direktorat Jasa Kelautan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%);
 - Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%);
 - Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)
 - Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%).
 - Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai).

2.2. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jasa Kelautan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen Direktorat Jasa kelautan untuk mencapainya dalam tahun 2024.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2024 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jasa Kelautan yang terdiri dari 11 (sebelas) IKU dan 9 (sembilan) IK.

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terlaksananya Pendataan Pergaraman	1.	Presentase Pendataan Pergaraman yang Dilaksanakan (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	2.	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (Orang)	390
3.	Meningkatnya Nilai PNBPDirektorat Jasa Kelautan	3.	Nilai PNBPDirektorat Jasa Kelautan (Rp.000)	100.000.142
4.	Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi	4.	Sarana Produksi Biofarmakologi yang Dibangun (Unit)	2
5.	Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut	5.	Lokasi yang Terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang Dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (Lokasi)	3
6.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi	6.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (Lokasi)	5
7.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Perairan	7.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (Lokasi)	3
8.	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas Garam	8.	Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang dibangun (Unit)	31
9.	Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi	9.	Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi (Ha)	75
10.	Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT	10.	Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)	8
		11.	Kawasan yang dibangun sarana prasarana BMKT (Kawasan)	2
11.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan	12.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	95
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)	88

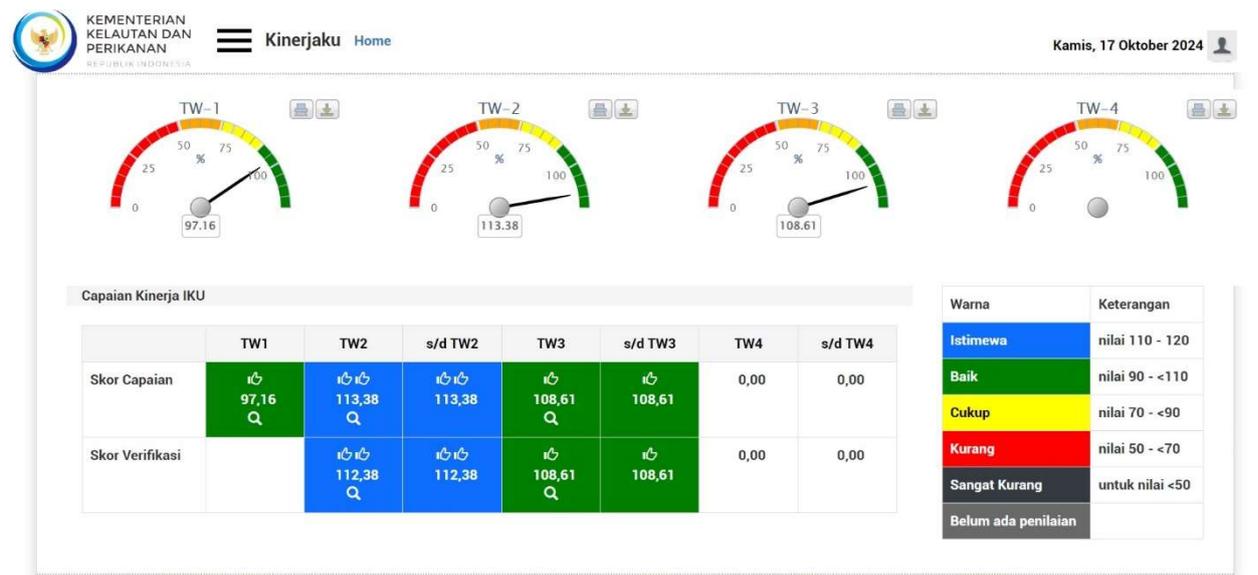
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	81
		15. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)	4
		16. Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		17. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		18. Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	100
		19. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	80
		20. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	75

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian kinerja organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Kelautan tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Kinerja Organisasi Direktorat Jasa Kelautan tahun 2024 adalah 108,61 (**Baik**) untuk IKU dan IK pada aplikasi kinerjaku.



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET TW III	CAPAIAN	%
1. Terlaksananya Pendataan Pergaraman	1. Presentase Pendataan Pergaraman yang Dilaksanakan (%)	100	-	-	-
2. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (Orang)	390	-	-	-
3. Meningkatnya Nilai PNBPD Direktorat Jasa Kelautan	3. Nilai PNBPD Direktorat Jasa Kelautan (Rp.000)	100.000.142	-	-	-
4. Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi	4. Sarana Produksi Biofarmakologi yang Dibangun (Unit)	2	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	TARGET TW III	CAPAIAN	%
5.	Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut	5.	Lokasi yang Terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang Dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (Lokasi)	3	-	-	-
6.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi	6.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (Lokasi)	5	-	-	-
7.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Perairan	7.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (Lokasi)	3	-	-	-
8.	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas	8.	Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang dibangun (Unit)	31	-	-	-
9.	Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat yang	9.	Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi (Ha)	75	-	-	-
10.	Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT	10.	Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)	8	-	-	-
		11.	Kawasan yang dibangun sarana prasarana BMKT (Kawasan)	2	-	-	-
11.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan	12.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	95	29	29,53	101,83
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)	88	-	-	-
		14.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	81	-	-	-
		15.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)	4	3	3	100
		16.	Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	94	133,33	120
		17.	Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80	80	87,8	109,75
		18.	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	100	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET TW III	CAPAIAN	%
	19.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	80	-	-	-
	20.	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	75	-	-	-

3.1.1. IKU 1 Persentase Pendataan Pergaraman yang dilaksanakan (%)

Data statistik sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah, termasuk diantaranya data pergaraman nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pembina petambak garam rakyat sangat membutuhkan data produksi garam dan data pokok kegiatan pergaraman rakyat lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data tersebut, KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut bekerjasama dengan Deputi Bidang Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktorat Statistik Industri. Kolaborasi antar Kementerian/Lembaga ini tidak hanya menghasilkan data pokok pergaraman nasional tetapi juga bertujuan untuk menyempurnakan metodologi dan tata cara pendataan untuk mendapatkan data garam yang akan dijadikan sebagai rujukan nasional bagi pengembangan usaha garam rakyat. Disamping itu juga untuk mewujudkan Satu Data Indonesia khususnya di sektor pergaraman nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Survei Produksi Garam Tahun 2024 merupakan kelanjutan dari survei yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan dilaksanakannya survei tersebut diharapkan akan menghasilkan data produksi usaha garam rakyat beserta karakteristiknya yang lebih lengkap. Hal ini sangat penting sebagai informasi bagi pemerintah agar kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran. Selain itu diharapkan hasil survei ini dapat bermanfaat untuk seluruh pemangku kepentingan pada usaha garam.

Secara umum tujuan kegiatan pendataan garam adalah untuk mendapatkan data produksi garam rakyat sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pengembangan usaha garam rakyat. Secara khusus tujuan pendataan garam adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data produksi garam rakyat secara nasional,
- b. Mengetahui karakteristik usaha garam, antara lain:
 - Penjualan garam
 - Stok akhir garam
 - Harga garam
 - Rata-rata lama pengkristalan
 - Jumlah pekerja di sektor garam

Pencacahan dilakukan secara sampel survei dimana hanya sebagian dari petambak garam yang akan menjadi obyek survei. Dalam kegiatan pencacahan, metode sampling yang digunakan adalah *Probability Sampling*. Sampel dipilih dari kerangka sampel (*List Frame*) yang merupakan

hasil listing kegiatan pendataan garam pada tahun 2020 yang dilakukan update dengan hasil kegiatan survei garam tahun 2021.

Alokasi sampel dihitung berdasarkan populasi petambak garam hasil pendataan tahun 2020 update tahun 2021. Penarikan sampel dilakukan secara sistematis. Jumlah sampel terpilih ditentukan dengan menggunakan rumus pengalokasian untuk memperoleh *minimal sample size* dengan tingkat kesalahan (*alpha*) sebesar 5% pada tingkat kabupaten/kota. Jumlah sampel terpilih tersebar di 13 provinsi dan 66 kabupaten/kota. Diharapkan dari sampel tersebut dapat menduga produksi dan karakteristik pokok lainnya terkait usaha garam rakyat sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Selain penyusunan data produksi garam, IKU ini juga mencakup penyusunan Informasi Geospasial (IG) Lahan Garam serta survei harga dan perhitungan NTPG.

Informasi Geospasial Lahan Garam merupakan salah satu Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang terdiri dari atas 2 (dua) produk yaitu IG Lahan Garam dan Informasi IG Gudang Garam. Spesifikasi yang diatur dalam IG Lahan Garam mulai dari identifikasi produk data, pemerolehan data, isi dan struktur data, sistem referensi, kualitas data, pengiriman produk data, metadata, pemeliharaan data, dan portrayal/visualisasi data.

Teknik Menghitung:

(pendataan pergaraman yang dilaksanakan / jumlah pendataan pergaraman yang direncanakan) * 100%

Tabel 1. Capaian IKU Persentase Pendataan Pergaraman yang dilaksanakan Triwulan III Tahun 2024

SS - 1		Terlaksananya Pendataan Pergaraman											
IKU - 1		Persentase Pendataan Pergaraman yang Dilaksanakan (%)											
Realisasi Tahun lalu		Tahun 2024*					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
100	100	-	Periode pengukuran Tahunan				100	-	100	100	100	100	

Perhitungan capaian IKU Persentase Pendataan Pergaraman dilakukan secara tahunan dan pada triwulan III ini belum ada capaian sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dengan Renstra.

Analisis **Keberhasilan** pencapaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2024 didukung oleh terlaksananya kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni:

1. Terlaksananya survei harga NTPG Bulan Januari sampai September di 11 kabupaten yaitu Aceh Utara, Aceh Timur, Cirebon, Indramayu, Pati, rembang, Lamongan, Sampang, Sumenep, Bima, dan Lombok Barat;
2. Bimbingan Teknis Pendataan Produksi Garam

Pada pelaksanaan kegiatan ditemui **kendala** yaitu penentuan sampel dan metodologi masih menunggu hasil listing (pemutakhiran data) petambak garam. **Solusi** dengan mempercepat pengolahan data listing. Terdapat **efisiensi sumberdaya manusia** karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam dimana petugas survei terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah, pada penyusunan IG Lahan Garam yaitu melibatkan staf Direktorat Jasa Kelautan untuk melakukan perbaikan hasil *quality control* sebagai masukan dari Bagian Data Setditjen PKRL tanpa melibatkan pihak ketiga.

Beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target keberhasilan IKU Persentase Pendataan Pergaraman sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Pendataan Produksi Garam

Kegiatan ini dilaksanakan di 2 lokasi yaitu Kabupaten Kupang pada tanggal 30 Juni – 3 Juli 2024 dan Kota Makassar pada tanggal 8-11 Juli 2024. Peserta merupakan perwakilan dinas perikanan, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Perikanan Bantu yang berasal dari Provinsi NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Gorontalo, dengan total peserta sebanyak 38 orang. Narasumber berasal dari Badan Pusat Statistik, Pusdatin KKP, dan Direktorat Jasa Kelautan. Materi yang disampaikan antara lain: pemutakhiran data (listing petambak garam) metodologi pendataan garam tahun 2024, mekanisme pendataan produksi garam, pengolahan data garam, dan *role playing*.



2. Pendataan Produksi Garam

Pendataan produksi garam dilaksanakan di 57 kabupaten/kota lokasi produksi garam yang tersebar di 10 provinsi sentra garam. Pendataan dilaksanakan oleh petugas enumerator yang merupakan Penyuluh Perikanan dari BPPSDMKP dan/atau unsur dinas perikanan kabupaten/kota. Jumlah sampel sebanyak 2.953 petambak garam.



3. Survei Harga NTPG

Survei harga NTPG dilaksanakan di 11 kabupaten yaitu Aceh Utara, Aceh Timur, Cirebon, Indramayu, Pati, Rembang, Lamongan, Sampang, Sumenep, Bima, dan Lombok Barat. Kegiatan survei dilaksanakan oleh petugas enumerator dari BPPSDMKP dan/atau unsur dinas perikanan kabupaten/kota.



4. Penyusunan Informasi Geospasial (IG) Lahan Garam

Survei dalam rangka penyusunan IG lahan garam dilaksanakan di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, dan Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 18-21 September 2024. Pelaksana survei adalah Tim dari Direktorat Jasa Kelautan didampingi para petambak garam yang memahami kepemilikan masing-masing tambak garam dan pembagian fungsi tambak garam (mulai dari kolam air muda, kolam air tua, peminihan, dan

meja kristalisasi). Data hasil survei lapang kemudian diolah dengan aplikasi GIS menjadi peta lahan garam.



Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024 adalah:

1. Penyelesaian IGT Provinsi NTT
2. Bimtek dan survei SDPT NTPG
3. Survei harga NTPG
4. Pendataan produksi

3.1.2. IKU 2 Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (orang)

Tenaga kerja yang terlibat di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik.

Kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan dan melibatkan tenaga kerja adalah:

- a. Sarana/Prasarana Niaga Garam
- b. Pengembangan Wisata Bahari
- c. Pengelolaan BMKT
- d. Pengelolaan Biofarmakologi

Teknik Menghitung:

$$\text{TK. Dit Jaskel} = \text{TK.SE} + \text{TK.WB} + \text{TK.BM} + \text{TK.BF}$$

Keterangan:

- a. TK.Dit Jaskel = Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan

- b. TK.SE = Sarana/prasarana Niaga Garam
- c. TK.WB = Pengembangan Wisata Bahari
- d. TK.BM = Pengelolaan BMKT
- e. TK.BF = Pengelolaan Biofarmakologi

Tabel 2 Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan (orang)

SS – 2		Meningkatnya Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan											
IKU – 2		Tenaga Kerja yang Terlibat dalam kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan (Orang)											
Realisasi Tahun lalu		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% RealisasiThd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
1.128	897	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-	

Perhitungan capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dilakukan secara tahunan menunggu selesainya pekerjaan fisik. Target IKU ini tahun 2024 adalah 390 orang, dan pada Triwulan ini belum bisa dihitung karena merupakan target tahunan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Target IKU ini tidak terdapat pada renstra sehingga tidak dapat dibandingkan. Data jumlah tenaga kerja per kegiatan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3 Rekap Tenaga Kerja yang Terlibat pada Kegiatan Direktorat Jasa Kelautan

No.	Kegiatan	TK Terlibat Langsung	TK Terlibat Tidak Langsung	Jumlah
1.	Pembangunan Sarana Niaga Garam	78		78
2.	Pengembangan Wisata Bahari			
3.	Pengelolaan BMKT			
5.	Pengelolaan Biofarmakologi			
	Total	78		78

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- 1) Sudah ada tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pembangunan Sarana/Prasarana Niaga Garam yaitu pada kegiatan pembangunan Gudang Garam Rakyat di Purworejo sebanyak 78 orang,
- 2) belum ada tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan Pembangunan Wisata Bahari dan BMKT karena anggarannya baru buka blokir pada Bulan Juni 2024,

- 3) Pengelolaan Biofarmakologi belum ada tenaga kerja yang terlibat karena masih dalam. Penyusunan KAK, HPS dan, Survei mesin dan peralatan, survei calon kelompok penerima dan Penetapan kelompok penerima bantuan.

Kendala untuk pencapaian IKU tenaga kerja adalah Kegiatan Pengadaan Unit Bisnis Biofarmakologi, Pembangunan Desa Wisata Bahari dan Pembangunan BMKT belum dimulai kegiatan sehingga jumlah tenaga kerja yang terlibat belum bisa dihitung.

Solusinya adalah untuk segera melaksanakan kegiatan Pengadaan Unit Bisnis Biofarmakologi, Pembangunan Desa Wisata Bahari dan Pembangunan BMKT yang digunakan untuk menghitung capaian IKU jumlah tenaga kerja yang terlibat.

Analisis efisiensi sumberdaya dalam pencapaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan tenaga kerja yang merupakan penerima bantuan, tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan sarana/prasana yang terlibat dalam kegiatan.

Rencana Aksi Triwulan IV 2024

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan GGN (Gudang Garam Nasional) dan Pembangunan WP (Washing Plant) serta GGR (Gudang Garam Rakyat).
2. Percepatan pembangunan unit bisnis biofarmakologi.
3. Percepatan pembangunan Desa Wisata Bahari dan,
4. Percepatan bantuan BMKT.

3.1.3. IKU 3 Nilai PNPB Direktorat Jasa Kelautan (Rp)

Dasar hukum penetapan IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jasa Kelautan (PNBP Jaskel) adalah penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan Izin Pelaksanaan/Pengelolaan Reklamasi, Kegiatan Wisata Bahari, pengangkatan BMKT, dan kegiatan pemanfaatan air laut selain energi dan Kegiatan Biofarmakologi dan Teknologi.

Teknik Menghitung:

PNBP Dit Jasa Kelautan = PNBP Reklamasi + PNBP Wisata Bahari + PNBP BMKT + PNBP Air Laut + PNBP Biofarmakologi



Tabel 4 Capaian IKU Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp. 000) Triwulan III Tahun 2024

SS - 3		Meningkatnya Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan											
IKU -3		Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp. 000)											
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW I	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target tahun	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
277.870,363	277.870,363	-	Periode pengukuran tahunan				12.431.094	623.183.463	-	-	-	-	

Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024

Pada Indikator ini pengukuran target dilakukan secara tahunan namun sudah terdapat capaian sebesar Rp.68.586.513.930,- hingga Triwulan III Tahun 2024. Untuk rincian tambahan besaran PNBP yang diperoleh pada Triwulan III ini, yaitu:

1. Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) sebesar Rp. 19.418.730
2. Izin Pelaksanaan Reklamasi sebesar Rp. 46.804.302.258
3. Izin Wisata Bahari sebesar Rp. 322.258.500
4. Penggunaan Marine Heritage Gallery sebesar Rp. 1.250.000

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Tim Kerja Perizinan Berusaha telah melaksanakan proses verifikasi perizinan sesuai dengan bisnis proses penerbitan izin pada kegiatan jasa kelautan. Sehingga dalam pelaksanaan tahapan proses perizinan tidak mengalami kendala dan dilakukan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh anggota tim kerja Perizinan Berusaha dan pelibatan pakar dalam pelaksanaan verifikasi perizinan. Pada proses verifikasi dokumen teknis dilakukan secara *hybrid* sehingga sumber daya dalam proses perizinan berusaha lebih efisien dan efektif.

Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, diantaranya:

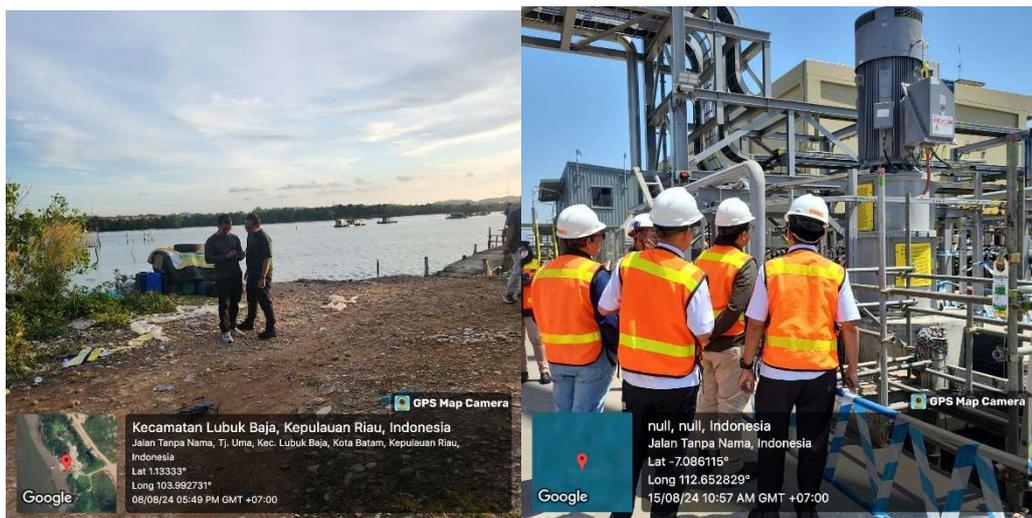
1) Verifikasi Dokumen Teknis Perizinan Berusaha

Verifikasi dokumen permohonan perizinan berusaha kegiatan jasa kelautan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III diantaranya:

- a. Izin Pemanfaatan Air Laut selain Energi
- b. Izin Pelaksanaan Reklamasi
- c. Izin Wisata Bahari

2) Verifikasi Lapangan

Setelah dilakukan verifikasi dokumen teknis dalam proses penerbitan perizinan berusaha, dilakukan verifikasi lapangan guna mengetahui kondisi lokasi yang dimohonkan. Pada Triwulan III ini telah dilaksanakan verifikasi lapang sebagai tahapan proses perizinan berusaha yang dimohonkan pada sistem OSS, diantaranya verifikasi lapang izin pelaksanaan reklamasi dan izin pemanfaatan air laut selain energi.



Dokumentasi Pelaksanaan Verifikasi Lapang Perizinan Berusaha

3) Penyusunan ISO 9001 dan ISO 37001

Sebagai upaya peningkatan manajemen organisasi dan proses perizinan berusaha, Direktorat Jasa Kelautan telah mengajukan sertifikasi ISO 9001 dan ISO 37001. ISO 9001 adalah standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization (ISO). Standar ini berisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau organisasi untuk membangun sistem manajemen

mutu. ISO 9001 adalah standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization (ISO). Standar ini berisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau organisasi untuk membangun sistem manajemen mutu. Pada Triwulan III ini telah dilakukan penyusunan dokumen sertifikasi kedua ISO tersebut.



Dokumentasi Penyusunan ISO 9001 dan ISO 37001

Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024:

Pada akhir triwulan 2024 ini, Tim Kerja Layanan Berusaha telah merencanakan beberapa kegiatan guna pencapaian target output di tahun 2024 agar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Berikut adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2024, diantaranya:

- 1) Penyelesaian dokumen dan Audit Eksternal Sertifikasi ISO 9001 dan 37001.
- 2) Konsultasi Publik terkait Perizinan Berusaha.
- 3) Verifikasi Dokumen Teknis dan Verifikasi Lapang.

3.1.4. IKU 4 Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (unit)

Kelompok usaha pengolahan/pemanfaatan produk biofarmakologi laut yang ditingkatkan kapasitasnya adalah kelompok atau koperasi yang mengolah biota laut menjadi produk biofarmakologi baik pengolah bahan baku dan/atau bahan setengah jadi (antara) dan/atau menjadi produk kosmetika, kosmosetika atau nutrasetika berbahan dasar biota laut dan/atau kelompok penyedia jasa/layanan pendukung kegiatan pemasaran produk hasil pengolahan yang ditingkatkan kapasitasnya. Menghitung jumlah kelompok usaha pengolahan/ pemanfaatan produk biofarmakologi laut yang terfasilitasi peningkatan kapasitas usahanya melalui bimbingan atau pelatihan diversifikasi produk atau pemasaran hasil produksinya.

Biofarmakologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/perekayasa organisme untuk keperluan farmasi. Unit bisnis biofarmakologi yang difasilitasi berupa unit usaha berbentuk kelompok atau koperasi yang menyediakan jasa pemanfaatan produk biofarmakologi baik pengolah bahan baku dan/atau bahan setengah jadi (antara) dan/atau menjadi produk kosmetika, kosmosetika atau nutrasetika berbahan dasar biota laut dan/atau kelompok penyedia jasa/layanan pendukung kegiatan pemasaran produk hasil pengolahan yang ditingkatkan kapasitasnya.

Tabel 5 capaian IKU Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (unit)

SS – 4		Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi										
IKU –4												
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
3	2	-	Pengukuran periode tahunan				100	-	2	100	2	100

Perhitungan capaian IKU Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun tahunan. Sehingga belum bisa dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023, maupun renstra.

Analisis keberhasilan: Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada TW III, yakni Finalisasi Perencanaan Design/LayOut Rumah Produksi Minyak Ikan Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat sesuai dengan standar bangunan untuk rumah olahan sebagaimana yang disyaratkan oleh Badan POM.

Kendala Persetujuan lay out dari Badan POM di daerah (Ibu Kota Provinsi) dapat terkendala karena beberapa hal, antara lain aplikasi dalam notifikasi permohonan verifikasi layout maupun persyaratan pemohon. Kendala ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembangunannya

Solusi yaitu Berbagai pihak dilibatkan dalam pembahasan perencanaan dari awal, baik untuk rumah produksi yang menghasilkan bahan obat, suplemen kesehatan maupun kosmetik. Lay out sebisa mungkin sesuai standar untuk verifikasi CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik) dan COPTB (Cara Produksi Obat yang Baik), meskipun produk yang dihasilkan masih dalam sediaan bubuk kasar.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya yaitu Untuk mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan di kemudian hari, maka Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) dan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menginisiasi Perjanjian Kerjasama Pemberdayaan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam dan Kosmetik Bersumber dari Produk Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan III, antara lain:

- 1) Finalisasi Perencanaan Design/Lay Out Rumah Produksi Minyak Ikan Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat. Finalisasi ini sesuai dengan standar bangunan untuk rumah olahan sebagaimana yang disyaratkan oleh Badan POM, antara lain Konsep Desain Sistem Tata Udara (KDSTU), sehingga bangunan yang diberikan nantinya dapat digunakan untuk mengurus sertifikasi mulai dari CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik), dan Bahan obat yang bersumber dari Obat Bahan Alam (OBA). Adapun selain minyak ikan, desain alat dan bangunan juga dapat digunakan untuk memproduksi albumin.
- 2) Peningkatan Kapasitas Unit Bisnis Biofarmakologi dalam bentuk Penandatanganan Kerjasama antara KKP-BPOM untuk pemberdayaan UMKM Biofarmakologi, dilakukan oleh Direktur Jenderal PKRL dengan Deputi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (OTSK) BPOM, 2 Agustus 2024.

- 3) Gerai Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan Surabaya. Tujuan Utama kegiatan ini adakah fasilitasi percepatan perizinan bagi tambak udang yang belum memiliki perizinan dan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), sehingga perlu adanya Sosialisasi dan Gerai Layanan Perizinan Berusaha. Gerai Layanan ini dilaksanakan pada tanggal 4 - 5 Juli 2024, di Grand City Surabaya. Kegiatan ini merupakan side event dari kegiatan APA (Asia Pacific Aquaculture) 2024. Instansi yang mengisi acara gerai ini adalah: KKP (Ditjen PKRL, DJPB), Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM dan KLHK. Peserta yang hadir adalah pemda, perguruan tinggi, asosiasi, dan pelaku usaha yang bergerak di bidang tambak udang.
- 4) Pembahasan SOP dan Pengambilan Sample Seawater Mining. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, dan pada tanggal 27 Agustus 2024 di Hotel Santika, Bogor. Acara dihadiri oleh Tim Kerja Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi, dengan narasumber dari Univ. Trunojoyo Madura, dan IPB. Hasil rapat mengamanatkan Direktorat Jasa Kelautan untuk menginisiasi identifikasi potensi seawater mining. Identifikasi Potensi Seawater Mining terdiri atas beberapa tahapan, yaitu: a. Persiapan dan Penentuan Lokasi Survey, b. Pengambilan Sampel, c. Pengujian Sampel, dan d. Pelaporan. Lokasi kegiatan di 15 provinsi yaitu: Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Gorontalo, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Banten.



Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Rencana Aksi Triwulan IV

- Pembangunan Rumah Produksi Minyak Ikan.

3.1.5. IKU 5 Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (lokasi)

Bangunan laut adalah setiap konstruksi yang berupa bangunan, baik yang berada di atas dan/ dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan. Instalasi Laut adalah setiap konstruksi yang berupa kabel dan pipa bawah laut, baik yang berada di atas dan/ dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan. Terdapat mandat dari Undang-Undang (UU) No.1 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu diatur tentang kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut, dokumen bangunan laut yang dimaksud adalah NSPK dan atau hasil pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun/didokumentasikan. Pada Tahun Anggaran 2023 Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai adalah lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut di 3 lokasi.

Tabel 6 capaian IKU Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut

SS - 5		Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut											
IKU - 5													
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
3	3	-	-	-	-	-	3	100	3	100	3	100	

Capaian IKU ini adalah tahunan sebanyak 3 lokasi sehingga belum bisa dibandingkan dengan Capaian tahun 2023 dan Renstra.

Penyusunan Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut dilaksanakan melalui koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta melibatkan pakar/ akademisi dalam penyusunan kebijakan, diharapkan efisiensi biaya dan sumberdaya dapat tercapai.

Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Dalam upaya penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan wilayah Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut, pada Tahun Anggaran 2024 tersebut berupa : (i) rekomendasi kebijakan Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut berupa Rig to reef, (ii) rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada dokumen yang diajukan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut berupa verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL serta (iii) penyusunan NSPK dan Bimbingan Teknis Penataan

dan Pengelolaan Bangunan dan Instalasi Laut. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada TW III, yakni terlaksananya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Penyusunan Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut dilaksanakan melalui koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta melibatkan pakar/ akademisi dalam penyusunan kebijakan, diharapkan efisiensi biaya dan sumberdaya dapat tercapai.

Aspek Anggaran : Realisasi fisik lebih besar daripada realisasi anggaran terutama kegiatan rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada dokumen yang diajukan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut berupa verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL.

Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : Kerjasama terkait dengan kegiatan *rig to reef*, dilia dengan berbagai pihak antara lain :Korea (KIORCC), dengan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi serta Korea Maritime and Ocean University Consortium (KMOUC), UPT Pontianak, LSM .

Aspek Teknologi : diskusi teknis secara daring maupun luring, pemanfaatan sistem informasi geografis (GIS) dan Sistem monitoring bangunan dan instalasi laut dalam rangka mempercepat dan efisiensi waktu, anggaran dalam pelaksanaan verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Kendala

Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut terlaksana sesuai dengan rencana tahunan yang telah disusun. Terkait rekomendasi kebijakan/ perizinan pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi laut KKPRL, banyaknya jumlah dokumen yang diajukan, lokasi tersebar di seluruh wilayah Indonesia, ketersediaan data dan peta yang memadai serta waktu penyampaian rekomendasi teknis yang singkat menjadi kendala dalam penyusunannya. Beberapa lokasi diperlukan verifikasi lapang, namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan personil maupun biaya. Terkait dengan penyusunan kebijakan *rig to reef*.

Solusi

Karena keterbatasan tersebut, untuk beberapa solusi yang dilakukan antara lain :

upaya koordinasi yang lebih intens dengan K/L terkait, UPT, pemerintah daerah yang terkait dengan lokasi pemberian rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut dan penggunaan sistem informasi geografis untuk mengolah data base yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spasial.

Kegiatan Pendukung

Dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan/perizinan pemanfaatan pesisir dan laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut pada triwulan III Tahun 2024 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

(i) Rekomendasi kebijakan Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut berupa Rig to reef

a. **Monitoring Sosial Ekonomi Rig to Reef**

Monitoring dampak social dan ekonomi adanya kegiatan rig to reef tanggal 5 – 6 Juli 2024 di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh Tim Sosial Ekonomi Universitas Mulawarman, BPSPL Pontianak wilker Balikpapan. Fokus kegiatan monitoring social ekonomi ini Masyarakat sekitar pesisir laut Bontang Kalimantan Timur yaitu ada kelurahan Melahing, Tanjung Laut dan Bontang Kuala.



Monitoring fisik rig to reef tanggal 5 – 6 Juli 2024

b. **Monitoring Fisik Rig to Reef**

Berdasarkan monitoring fisik rig to reef yang telah dilakukan pada tanggal 29 April – 7 Mei 2024, selanjutnya dilakukan pembahasan analisis hasil monitoring fisik rig to reef pada 24-25 Juli 2024 di Jakarta oleh seluruh tim kerja Bangunan dan Instalasi Laut, perwakilan BPSPL Pontianak, penyelam dan pendamping pelaksana kegiatan dari Universitas Mulawarman. Analisis yang dilakukan meliputi kualitas air, CPCE, e-DNA dan keragaman ikan dan karang.



c. Sistem Monitoring Bangunan dan Instalasi Laut

DJPRL dan BPISDKP (Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), SETJEN telah menyusun Deteksi Perubahan Lahan Bangunan di atas Permukaan Laut secara Otomatis Berbasis Citra Satelit Optis Sentinel-2

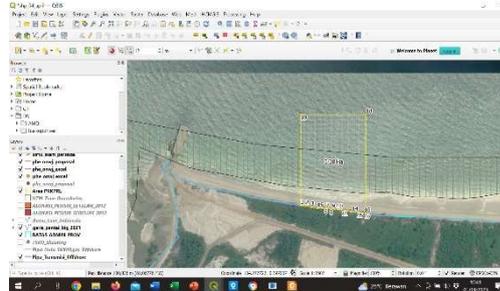
Pertemuan sistem monitoring bangunan dan instalasi laut dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2024 di Denpasar - Bali dalam rangka mengembangkan system monitoring untuk mendukung pelayanan perizinan, monitoring reklamasi/bangunan/instalasi laut, produksi garam, wisata bahari



Sentinel-2 (S2) is a wide-swath, high-resolution, multispectral imaging mission with a global 5-day revisit frequency. The S2 Multispectral Instrument (MSI) samples 13 spectral bands: visible and NIR at 10 meters, red edge and SWIR at 20 meters, and atmospheric bands at 60 meters spatial resolution. It provides data suitable for assessing state and change of vegetation, soil, and water cover.



- (ii) Rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada dokumen yang diajukan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut berupa verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL Kegiatan diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang telah diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penilaian teknis permohonan KKPRL . Penilaian teknis permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) dilaksanakan secara hybrid.



Dokumentasi pembahasan rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

- (iii) Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis mengenai pengenalan teknologi ROV dalam rangka mendukung Monitoring Bangunan dan Instalasi Laut dalam rangka pengembangan SDM dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2024, diikuti oleh 14 orang berkolaborasi dengan salah satu perusahaan, yakni manufaktur Robo Marine Indonesia bertempat di Bandung – Jawa Barat. Beberapa materi dalam bimbingan teknis tersebut antara lain : General System; ROV Sensor dan Navigation System; serta ROV Pool Operation yaitu praktek mengemudikan ROV pada kolam air dengan kedalaman lima meter.

Robomarine adalah produsen alat survey yang bersifat robot sibuat secara Costum dan sepenuhnya dikerjakan oleh anak bangsa. Perlu kerjasama antara pemerintah dan robomarine dalam mengembangkan survey-survey kelautan.



(iv) Penyusunan NSPK berupa Naskah Akademik Kebijakan Rig to Reef

a. **Pembahasan terkait Muatan Pengaturan Dana Pembongkaran Bangunan dan Instalasi Laut pada Peraturan Menteri mengenai Dana Berkelanjutan Sektor Kelautan Perikanan**

Peraturan Menteri ini dirancang untuk memperoleh sumber dana yang bervariasi selain dari APBN, dengan skenario yang tidak dapat dilakukan oleh pihak non-negara. Pelaksanaan kegiatan akan mengikuti program kebijakan yang ada, sambil memastikan bahwa kegiatan tetap berjalan dengan prioritas dan relevansi yang jelas. Pendanaan dapat disusun dalam satu rekening BPLDH yang terencana dan terstruktur, sehingga dana tersebut dapat dioptimalkan dan dimaksimalkan untuk kepentingan operator dan upaya konservasi. Salah satu potensi sumber dana yakni Dana Pembongkaran Bangunan dan Instalasi Laut ASR. Dana ASR mencakup 4 kegiatan : Engineering dan Survey, Formality (perijinan), Pembongkaran fasilitas, dan Site Restoration. Pertemuan membahas potensi pemanfaatan dana ASR dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus, 21 Agustus dan 25 September 2024.



b. Pembahasan Kajian Rig to Reef PT Mubadala Energy

Kajian Rig to Reef disusun oleh PT Mubadala Energy, yang merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Blok Sebuku yang berlokasi di Selat Makassar Kajian yang disusun yakni Dampak sosial ruby platform abandonment and site restoration (ASR) partial in-situ rig to reef. Pembahasan kajian dilaksanakan di Mamuju -Sulawesi Barat tanggal 5-8 Agustus 2024, Banjarmasin – Kalimantan Selatan pada tanggal 29 – 31 Juli 2024 serta di Bogor- Jawa Barat pada tanggal 12-13 September 2024.



Rencana Aksi Triwulan IV

1. Penyusunan laporan *Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut,*
2. Finalisasi laporan monitoring fisik rig to reef,
3. Finalisasi laporan dampak social ekonomi rig to reef.

3.1.6. IKU 6 Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (lokasi)

Definisi dari reklamasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang pengelolaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Fasilitasi pengelolaan reklamasi merupakan proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Reklamasi dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan

termasuk proses perizinannya. Perencanaan juga dapat disertai dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi stakeholders. Pelaksanaan reklamasi berupa kegiatan konstruksi reklamasinya. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan reklamasi dan penyelesaian permasalahan yang mungkin terjadi.

Pengelolaan Reklamasi mencakup kegiatan berikut, diantaranya:

- a. Sosialisasi reklamasi dan sumber material reklamasi
- b. Layanan Perizinan Pelaksanaan Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi
- c. Pengelolaan Basis Data Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi
- d. Penyusunan NSPK Pengelolaan Reklamasi.

Tabel 7 capaian IKU Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (lokasi)

SS – 6		Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi											
IKU – 6		Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (lokasi)											
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	5	-	-	-	-	0	5	100	5	100	5	100	

Untuk triwulan III IKU tidak ada target disebabkan target IKU ini adalah tahunan, sehingga belum bisa dibandingkan, baik triwulan III tahun 2023 maupun dengan renstra.

Analisis Keberhasilan:

- Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi
- Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Reklamasi dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi
- Terlaksananya Survey dan Pengambilan sampel sedimen di perairan Karimun sebagai salah satu lokasi prioritas pembersihan hasil sedimentasi di laut bersama K/L terkait

Kendala

Pada pengelolaan hasil sedimentasi di laut terdapat beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan penyusunan aturan pendukung dan proses bisnis dalam pengelolaan hasil sedimentasi yang melibatkan Kementerian/Lembaga lain. Sulitnya koordinasi dan perbedaan konsep dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut antara KKP dengan K/L lain.

Solusi

Solusi yang telah dilakukan dalam proses pengelolaan hasil sedimentasi di laut ini adalah dengan melakukan pembahasan bersama Kementerian/Lembaga terkait secara intensif dan berkoordinasi lebih lanjut sehingga diperoleh capaian terbaik dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Kegiatan Pendukung

Pada Pengelolaan reklamasi dan sumber material di Triwulan III 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung dalam upaya pencapaian target output, yaitu:

1. Survey dan Pengambilan Sampel Hasil Sedimentasi di Laut pada perairan Karimun

Telah dilaksanakannya survei bersama untuk melakukan pengambilan sampel pasir hasil sedimentasi di laut di lokasi prioritas Perairan Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau diikuti perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Lembaga Surveyor (PT. Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia). Survei dilaksanakan dengan metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu metode vibro core dengan kedalaman kurang lebih 5 meter.

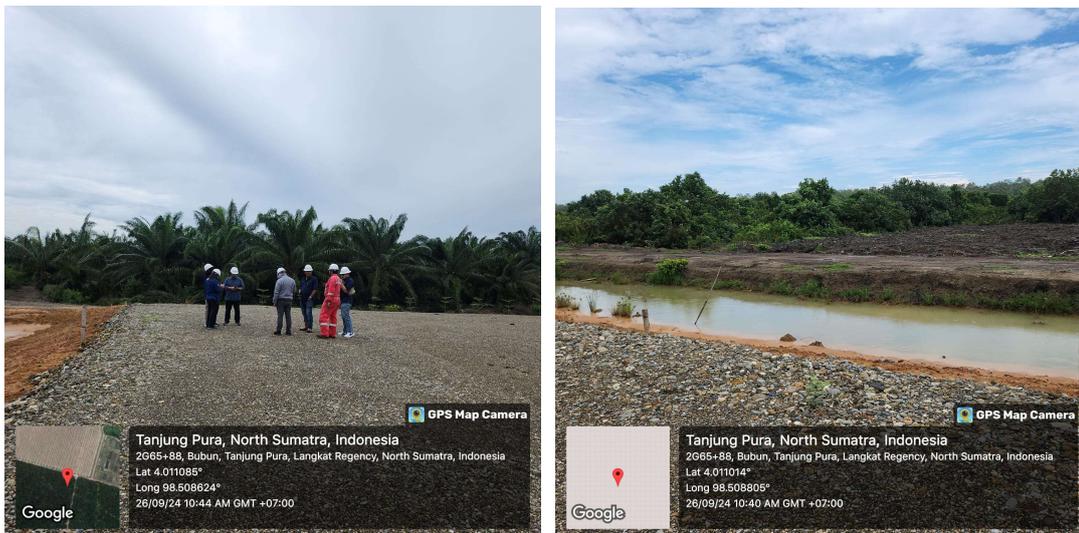
Berdasarkan sampel yang diperoleh dari kedalaman kurang lebih 5 (lima) meter, sesuai kesepakatan dilakukan proses homogenisasi untuk pengujian di laboratorium. Namun demikian untuk memaksimalkan pengujian dari sampel yang diperoleh, Kementerian ESDM meminta untuk mengambil sampel per lapisan (layer). Tindak lanjut hasil survey yaitu akan dilakukan pembahasan bersama apabila telah selesai dilakukan pengujian di laboratorium untuk sampel yang pertama.



Dokumentasi Pelaksanaan Survey dan Pengambilan Sampel Sedimentasi di Laut

2. Monitoring Izin Pelaksanaan Reklamasi BUT EMP Gebang di Langkat, Sumatera Utara

Pada Triwulan III ini dilakukan monitoring pertama Izin Pelaksanaan Reklamasi BUT EMP Gebang. Hasil monitoring yang ditemukan pelaksana monitoring dan diakui oleh pelaksana reklamasi adalah BUT EMP Gebang Limited belum melaksanakan konstruksi reklamasi karena masih menunggu jadwal pelaksanaan konstruksi pada bulan Oktober 2024 sampai dengan Maret 2025. BUT EMP Gebang Limited telah melakukan perbaikan lahan di daratan yang akan digunakan sebagai pusat tempat pelaksanaan konstruksi reklamasi (camp construction). BUT EMP Gebang diminta agar melaksanakan konstruksi reklamasi sesuai dengan titik koordinat yang tercantum dalam Izin Pelaksanaan Reklamasi.



Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring BUT EMP Gebang

3. Sosialisasi Perizinan Reklamasi dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut di Padang

Sosialisasi Perizinan Reklamasi dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut telah dilaksanakan bertujuan untuk penyebarluasan informasi regulasi terkini perihal perizinan reklamasi dan bagaimana pengelolaan hasil sedimentasi yang dimanfaatkan sebagai sumber material, serta pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan reklamasi dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Sosialisasi ini juga menghadirkan beberapa narasumber dari lingkup akademisi untuk dapat menjelaskan secara teknis proses pelaksanaan reklamasi yang ramah lingkungan.

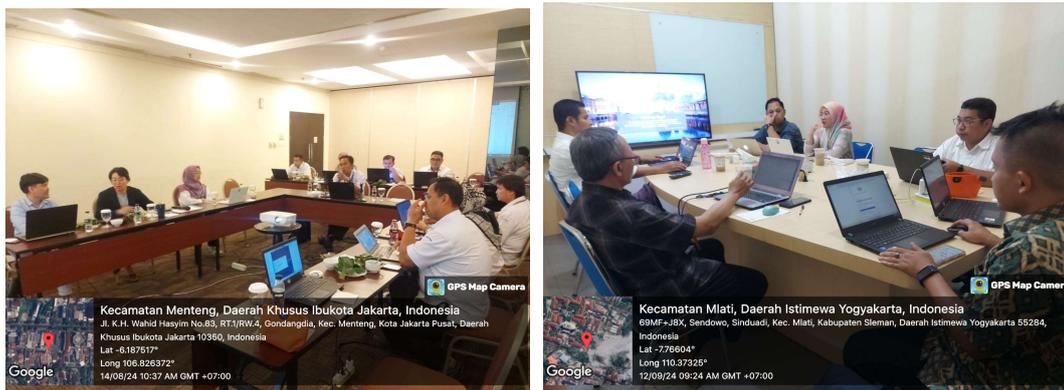


Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Reklamasi dan Hasil Sedimentasi di Laut

4. Pembahasan Petunjuk Teknis Pengambilan Sampel Sedimentasi di Laut

Pembahasan Petunjuk Teknis Pengambilan Sampel Sedimentasi di Laut disusun dalam rangka melengkapi NSPK dalam Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Penyusunan Petunjuk Teknis ini dilaksanakan dengan menjangkau informasi dan pengumpulan data standar prosedur pengambilan sampel sesuai standar nasional. kegiatan ini dilakukan

dengan berdiskusi bersama para akademisi, kementerian/lembaga terkait, dan para praktisi di bidang pemanfaatan sedimen.



Dokumentasi Penyusunan Petunjuk Teknis Pengambilan Sampel Sedimentasi di Laut

5. Survei verifikasi dan validasi IG_Reklamasi_WP3K

Survei verifikasi dan validasi IG_Reklamasi_WP3K dilakukan dengan mengunjungi lokasi sampling dari IG_Indikasi_Reklamasi yang telah ditentukan IG_Indikasi_Reklamasi merupakan penyusunan atau penentuan lokasi luasan lahan yang dianggap merupakan hasil reklamasi, dimana ditentukan melebihi dari bangunan/lahan inti yang melewati garis pantai. Penentuan sampling dari IG_Indikasi_Reklamasi diluar dari DLKr dan DLKp yaitu wilayah kewenangan kepelabuhanan yang merujuk pada Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. DLKr dan DLKp merupakan kewenangan dan mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan. Sedangkan sampling yang dipilih berdasarkan indikasi yang mendapatkan ijin reklamasi dari persetujuan pemanfaatan ruang laut yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tim mengunjungi Kawasan Industri Terpadu Wilmar PT Multimas Nabati Asahan di Kabupaten Serang. Kawasan Industri Terpadu Wilmar memiliki luas 800 hektar. Dari 800 hektar tersebut memiliki ijin Kawasan Reklamasi seluas total 125,25 hektar sesuai dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor: 17022210513600001, tanggal 17 Februari 2022 atas nama PT. Multimas Nabati Asahan, ijin yang diberikan untuk Pengembangan Kawasan Industri.

Tim diterima di Ruang Kantor Pengelola PT. Multimas Nabati Asahan oleh Bapak Bambang Manager Humas, Kepala Tim Operasional dan Kepala Tim Perizinan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari izin reklamasi yang dikeluarkan sebesar 125,25 hektar terbagi menjadi :

1. 22,67 hektar lokasi reklamasi eksisting yang telah digunakan,
2. 40,00 hektar lokasi reklamasi yang sudah ditimbun dalam masa pengeringan,
3. 53,17 hektar lokasi reklamasi yang digunakan untuk *causeway*, dan

4. 9,41 hektar merupakan reklamasi yang digunakan untuk Dermaga *Jetty*.

Tim KKP melakukan wawancara untuk menggali informasi sesuai dengan form survey *ground check* IG_Reklamasi_WP3K, setelah itu melakukan survey verifikasi dan validasi mengunjungi ke lokasi hasil reklamasi yang dilakukan oleh PT Multimas Nabati Asahan. Survei ke lokasi lapangan dilakukan untuk memastikan validitas lahan reklamasi dengan melakukan *tagging* pada batas terluar lahan reklamasi, kami tidak diizinkan menggunakan pengambil gambar dari udara menggunakan *drone* karena termasuk ke dalam lokasi *restricted area*.

Hasil yang didapat dari survey verifikasi dan validasi IG_Reklamasi_WP3K di PT Multimas Nabati Asahan sesuai dengan perijinan dan telah mendapatkan informasi untuk melengkapi atribut basisdata IG_Reklamasi_WP3K.



Dokumentasi Survei verifikasi dan validasi IG_Reklamasi_WP3K

Tim mengunjungi Kawasan Penginapan Pribadi (resort) atas nama PT Starmas Inti Alumunium Industry dan PT Anyar Resort Mitra Sejati di Kabupaten Pandeglang. Kawasan resort/penginapan pribadi adalah Kawasan yang berdampingan dan dimiliki oleh dua saudara pemilik ijin reklamasi yang merupakan pemilik perusahaan. PT Anyar Resort Mitra Sejati memiliki ijin Kawasan Reklamasi seluas total 1,54 hektar sesuai dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor: 28032310513600001, tanggal 28 Maret 2023, ijin yang diberikan untuk pembangunan sarana penunjang hotel. PT Starmas Inti Alumunium Industry memiliki ijin Kawasan Reklamasi seluas total 1,02 hektar sesuai dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor: 28032310513600002, tanggal 28 Maret 2023, ijin yang diberikan untuk dermaga marina.

Tim di terima oleh Kepala Staf Villa Starmas Bapak Tata di Pendopo Villa Starmas yang merupakan penginapan pribadi milik pemilik PT Starmas Inti Alumunium Industry. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dalam wawancara dan pengisian form survey *ground check* IG_Reklamasi_WP3K, bahwa ijin reklamasi yang diberikan berdampingan antara PT Anyar Resort Mitra Sejati dan PT Starmas Inti Alumunium Industry yang diajukan dalam waktu bersamaan dan pemiliknya adalah kakak beradik. PT Starmas Inti Alumunium Industry memiliki ijin reklamasi untuk dermaga marina pada penginapan pribadi dan PT

Anyar Resort Mitra Sejati untuk pembangunan sarana penunjang hotel yang sedang di bangun yaitu Hotel Mercure.

Survei ke lokasi lapangan dilakukan untuk memastikan validitas lahan reklamasi dengan melakukan pengambilan foto udara terkoreksi geometrik dengan menggunakan drone untuk memetakan lahan reklamasi, Tim juga melakukan peninjauan langsung melakukan verifikasi ke lapangan.



Dokumentasi Survei verifikasi dan validasi IG_Reklamasi_WP3K

Rencana Aksi Triwulan IV:

- 1) Studi lapang proses pembersihan hasil sedimentasi di laut sebagai tahapan dalam proses pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
- 2) Pembahasan lanjutan revisi aturan pelaksana pengelolaan hasil sedimentasi di laut
- 3) Penyusunan pengelolaan basis data reklamasi

3.1.7. IKU 7 Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (lokasi)

Perizinan perairan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selain kegiatan reklamasi meliputi kegiatan pemanfaatan air laut selain energi, kegiatan wisata bahari, kegiatan terkait bangunan dan instalasi laut, bioteknologi laut dan biofarmakologi laut, serta pengangkatan BMKT.

Fasilitasi perizinan perairan merupakan proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan usaha pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir dan laut dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan termasuk proses perizinannya. Perencanaan juga dapat disertai dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi stakeholders.

Pelaksanaan berupa kegiatan teknis usahanya. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha dan penyelesaian permasalahan yang mungkin terjadi.

Fasilitasi Perizinan Perairan salah satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha melalui sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan sumberdaya perairan serta verifikasi perizinan pengelolaan air laut.

Tabel 8 capaian IKU Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (lokasi)

SS - 7		Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Perairan											
IKU - 7		Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (lokasi)											
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW III	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	100%	-	Periode pengukuran tahunan				5	5	5	5	5	5	

Capaian IKU Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan dilakukan secara tahunan sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun Renstra.

Analisis keberhasilan: telah dilaksanakannya sosialisasi pengelolaan perairan di beberapa daerah,

Kendala: masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan perairan,

Solusi: perlu sosialisasi kepada pelaku usaha dan Masyarakat terkait pengelolaan perairan

Analisis Sumber Daya manusia: Melibatkan petambak garam dan pengurus koperasi dan dinas lingkungan hidup pada setiap sosialisasi pengelolaan perairan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

Sosialisasi pengelolaan sumberdaya pesisir untuk pengusahaan jasa kelautan dilaksanakan di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Jepara pada tanggal 22 Agustus 2024. Peserta berasal dari penyuluh perikanan, perwakilan petambak garam, perwakilan pengelola wisata bahari, perwakilan pembudidaya ikan, perwakilan nelayan, dan kelompok usaha wanita pesisir. Narasumber antara lain dari Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, Fakultas Sains dan Teknologi UNISNU, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Dinas Lingkungan Hidup.



Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

1. Sosialisasi dan Bimtek pengelolaan Perairan
2. Verifikasi dan monitoring pengelolaan sumber daya perairan

3.1.8. IKU 8 Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang Dibangun (unit)

Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman, yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam rakyat dan telah menyalurkan bantuan sarana/prasarana mulai dari praproduksi sampai pemasaran.

Pada tahap praproduksi, PUGaR telah menyalurkan bantuan berupa perbaikan saluran irigasi, jalan produksi, dan kolam penampungan air. Pada tahap produksi telah dilakukan pemberian bimbingan teknis dan sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas petambak garam, integrasi tambak garam, penyusunan informasi geospasial lahan garam, penerapan teknologi pembuatan garam. Dukungan pada tahap pengolahan antara lain pembangunan dan revitalisasi pabrik pencucian garam, diversifikasi komoditas pergaraman, Bimtek pengelola sarana produksi, dan peningkatan kerjasama dan investasi dengan BUMN, BUMD, dan swasta.

Dukungan PUGaR dalam pascaproduksi adalah pembangunan Gudang garam, fasilitasi pembiayaan usaha Gudang penyimpanan garam, pemberian insentif biaya transportasi, pendataan hasil produksi dan stok garam, dan penyusunan neraca komoditas pergaraman. Fasilitasi pengolahan untuk menghasilkan garam berkualitas dilakukan melalui penyediaan mesin pemurnian/pencucian garam, diversifikasi komoditas pergaraman. Pengembangan pemasaran meliputi pengembangan sistem informasi komoditas pergaraman berbasis digital dan pengembangan jaringan distribusi pemasaran.

Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dilaksanakan pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yaitu pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Pelaksanaan SEGAR dilaksanakan melalui sistem bisnis pergaraman yang tertuang dalam rencana aksi. Intensifikasi lahan merupakan salah satu bagian dari rencana aksi yang diimplementasikan dalam bentuk integrasi lahan untuk tambak garam dan pemanfaatan teknologi produksi garam, sedangkan ekstensifikasi lahan dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan lahan baru, pembukaan lahan baru, dan koordinasi dalam rangka penyediaan aksesibilitas menuju kawasan tambak garam.

Penyaluran bantuan sarana/prasarana di kawasan terpadu menjawab kebutuhan petambak garam pada tahap pascaproduksi dan pengolahan. Pada tahun 2024 akan dibangun sarana/prasarana berupa:

- Gudang Garam Rakyat (GGR)
- Rumah Garam
- Washing Plant
- Gudang Garam Nasional (GGN)

Tabel 9 Capaian IKU Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang Dibangun (unit)

SS - 8		Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas Garam											
IKU - 8		Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang Dibangun (unit)											
Realisasi Tahun lalu		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
5	5	-	Periode pengukuran tahunan				31	100	31	100	5	100	

Pengukuran capaian IKU Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang dibangun dilaksanakan secara tahunan. Sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan Renstra.

Analisis **Keberhasilan** pada Triwulan III Tahun 2024 telah dilakukan:

1. Penandatanganan kontrak penyedia dan proses pembangunan GGN Cirebon
2. Penandatanganan kontrak penyedia dan proses pembangunan integrasi lahan garam Lombok Barat
3. Penandatanganan kontrak penyedia dan proses pembangunan rumah garam Pidie Jaya
4. Penandatanganan kontrak penyedia dan proses pembangunan washing plant Bima
5. Penandatanganan kontrak penyedia dan proses pembangunan GGR Karawang, Indramayu, Cirebon, Rembang, Pati, Pamekasan, Sumenep, Sumbawa, Pangkep, dan Jeneponto,
6. Serah Terima GGR Purworejo.

Kendala yang dihadapi dalam pembangunan sarana/prasarana garam ini adalah penyiapan lahan dan pemilihan penyedia.

Solusi yaitu koordinasi percepatan penyiapan lahan agar siap bangun dan pemilihan penyedia

Analisis Sumber Daya Manusia: dalam proses pembangunan sarana/prasarana melibatkan tenaga kerja setempat yang kompeten dan keterlibatan dinas setempat sebagai tim teknis.

Kegiatan Pendukung:

1. Kegiatan MC0 pembangunan GGR, di Indramayu, Pati, Rembang, Sumenep, Pangkep, Jeneponto, Karawang, Cirebon, Sumbawa dan GGN di Cirebon serta WP di Bima



Kegiatan MC0 GGR di Indramayu

2. Pelaksanaan Kontraktual 33 unit Pembangunan Gudang Garam Rakyat 1 unit Gudang Garam Nasional dan 1 Unit WP



Progres Pembangunan GGR di Cirebon

3. Serah terima bantuan Gudang Garam Rakyat di Purworejo pada tanggal 11 – 13 September 2024



Serah Terima GGR di Purworejo

Rencana aksi Triwulan IV Tahun 2024:

1. Penyelesaian Pembangunan Sarana Prasarana di Sentra Ekonomi Garam,
2. Serah Terima Pekerjaan Barang kepada Masyarakat.

1.1.9. IKU 9 Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi (Ha)

Fasilitasi lahan garam merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas garam, melalui kegiatan integrasi tambak garam atau revitalisasi lahan garam. Integrasi tambak garam adalah penyatuan tempat dan proses produksi Garam dalam

kesatuan hamparan yang utuh paling sedikit seluas 15 (lima belas) hektare. Revitalisasi lahan garam adalah upaya memperbaiki lahan garam dengan penerapan teknologi geomembran, rumah garam, atau skimmer air laut.

Teknik Menghitung dengan cara Menginventarisasi dan menjumlahkan luasan lahan garam yang difasilitasi integrasinya dan/atau direvitalisasi lahannya.

SS - 9		Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi											
IKU - 9		Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi (Ha)											
Realisasi Tahun lalu		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	-	-	Periode pengukuran tahunan				75	100	-	-	-	-	

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa IKU Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi ini dihitung secara tahunan dan merupakan IKU baru sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan tidak terdapat dalam Renstra.

Analisi keberhasilan: telah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan integrasi lahan di Pangkep

Analisis sumberdaya: proses penataan lahan melibatkan tenaga kerja setempat yang kompeten dibidangnya dan tenaga ahli.

Hambatan/kendala : proses konsolidasi lahan masyarakat untuk integrasi.

Solusi : Koordinasi dengan pemilik lahan dan ketua koperasi.

Kegiatan yang telah dilakukan Triwulan III adalah:

1. Koordinasi kesesuaian dokumen perencanaan integras lahan garam bersama perencana, dinas kelautan dan perikanan kabupaten pamekasan/pangkep, pemilik lahan, dan koperasi calon penerima bantuan.



2. Kunjungan lapang untuk mengetahui kondisi lahan eksisting di Pangkep dan Pamekasan



Rencana Aksi Triwulan IV:

- Pelaksanaan pekerjaan Intergrasi lahan Kab. Pamekasan serta Pangkajene Kepulauan.

1.1.10. IKU 10 Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya terfokus pada pengelolaan perikanan namun juga pada sumberdaya lain seperti pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk atraksi wisata bahari. Pengusahaan wisata bahari telah banyak dilakukan di Indonesia namun masih didominasi oleh pelaku usaha tanpa melibatkan masyarakat lokal. Direktorat Jasa Kelautan mendorong pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat dengan harapan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan kawasan wisata bahari tersebut dikemas dalam bentuk Pengembangan Desa Wisata Bahari yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari dimana pembangunan sarana prasarana merupakan salah satu tahapannya. Sarana prasarana yang dibangun mencakup sarana prasarana wisata bawah laut, bentang laut, dan wisata pesisir. Salah satu atraksi wisata bahari bawah laut yang belum banyak dikembangkan di Indonesia adalah Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Capaian Indikator Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan wisata bahari yang dikelola melalui pemberian sarana/prasaranapengelolaan wisata bahari.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

1.1.11. Tabel 10. Capaian IKU Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)

SS 10		Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT											
IKU - 10		Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)											
RealisasiTahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2024	% Capaian thd target	Target 2024	%Capaianthd target	

17	12	10	-	-	-	8	120 (kinerjaku)	60 (kumulatif)	85	60 (kumulatif)	85
----	----	----	---	---	---	---	-----------------	----------------	----	----------------	----

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disampaikan bahwa target pada tahun 2024 sebanyak 10 (sepuluh) kawasan dan pengukurannya dilaksanakan secara tahunan sehingga pada triwulan III belum terdapat capaian terhadap target tersebut dan belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL.

Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024. Pada triwulan III tahun 2024 telah dilakukan Penetapan penerima sarana wisata bahari tahap I dilakukan pada pada tanggal 30 Juli 2024 dengan penerima sebagai berikut:

- a. Kab. Minahasa Utara (BUMDes Desa Palaes)
- b. Kab. Kendal (BUMDes Sidodadi, Desa Jungsemi)
- c. Kab. Jepara (BUMDes Teluk Makmur, Desa Teluk Awur)
- d. Kab. Pasuruan (Unit Pengelola Wisata Mangrove Penunggul Park, Desa Penunggul)
- e. Kab. Lombok Timur (Pokja Dewi Bahari Padak Guar, Desa Padak Guar)
- f. Kota Bima (Pokmaswas So Pancala, Kelurahan Kolo)
- g. Kab. Kepulauan Anambas (BUMDes Tujuh Kunci, Desa Batu Belah)

Selain dilakukan penetapan penerima tersebut, telah dilakukan juga perencanaan pengadaan barang jasa utk lokasi tersebut.

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Pada Triwulan III Tahun 2023 telah terdapat sebanyak 4 (empat) kawasan wisata bahari yang dibangun. Namun pada tahun Triwulan III tahun 2024 belum terdapat capaian.

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Capaian Triwulan III tahun 2024 tidak dibandingkan dengan target pada Renstra DJPKRL karena IKU dihitung pada akhir tahun.

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional belum bisa dibandingkan sdisebabkan belum selesainya pekerjaan.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab belum tercapainya target pada triwulan ini adalah adanya blokir anggaran hingga akhir triwulan II sehingga menghambat seluruh pelaksanaan kegiatan.

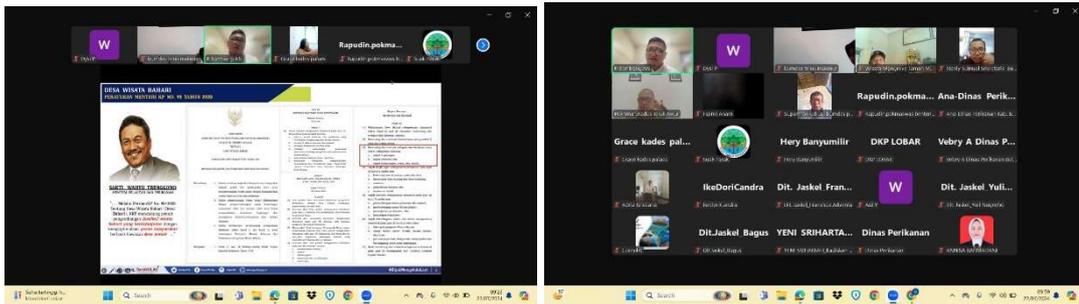
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan koordinasi intensif secara online dengan dinas, desa, dan kelompok calon penerima serta melakukan survey dan identifikasi lapang berbarengan pada waktu yang sama dengan kegiatan lain.

Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni

- 1) Rapat koordinasi pengawasan penerima bantuan wisata bahari



Rapat koordinasi pengawasan penerima bantuan wisata bahari dilakukan pada tanggal 22 Juli 2024 dengan mengundang pengelola wisata bahari dari 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota.

- 2) Penyusunan perencanaan barang jasa melalui listing di ekatalog
- 3) Bimbingan Teknis Pengelolaan Wisata Bahari mengundang peserta dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota
- 4) Bimtek dilaksanakan pada tanggal 25 - 27 September 2024 bertempat di Hotel Atanaya, Provinsi Bali dengan materi sebagai berikut:
 - Pengelolaan desa wisata dengan narasumber dari Desa Wisata Tinalah, Kab. Kulon Progo
 - Teknik Fotografi dan Konten Kreator dengan narasumber dari Digital Mangrove, Lombok
 - Digital Marketing dengan narasumber dari Traveloka
- 5) Penyusunan perencanaan LAUTRA

Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

- 1) Sertifikasi dan peningkatan kapasitas selam pengelola wisata bahari
- 2) Identifikasi calon lokasi LAUTRA di lokasi lain di Provinsi NTT
- 3) Penetapan penerima sarana wisata bahari dan BMKT Tahap II
- 4) Serah terima sarana wisata bahari dan BMKT

3.1.11. IKU 11 Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) merupakan sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar negara dan masyarakat sebagai perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau salah satu sejarah kemaritiman bangsa kita, Kawasan BMKT yang dikelola merupakan kabupaten yang memiliki potensi pengembangan dan pelestarian BMKT untuk dikelola secara baik melalui pemberian bantuan sarana/prasarasannya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di lokasi perairan BMKT/insitu maupun digaleri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri lainnya

Kawasan BMKT teridentifikasi titik lokasi dan kondisinya melalui identifikasi lokasi insitu BMKT. Identifikasi BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya.

Tabel 11. Capaian IKU Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)

SS 11		Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT											
IKU – 11		Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)											
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2024	% Capaian thd target	Target 2024	%Capaianthd target	
2	2	2	-	-	-	-	2	-	2	100	2	100	

Capaian IKU dihitung tahunan sehingga pada triwulan III ini belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan Renstra.

Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024. Pada triwulan III tahun 2024 telah dilakukan identifikasi calon penerima sarana BMKT

Identifikasi sarana pengelolaan BMKT di Kab. Kepulauan Seribu

Identifikasi sarana pengelolaan BMKT di Kab. Kepulauan Seribu pada tanggal 24 - 25 Agustus 2024 di Pulau Untung Jawa dengan hasil sebagai berikut:

- Hasilnya ditemukan 4 (empat) buah kapal tenggelam dalam kondisi masih utuh. Kapal berada pada kedalaman 8 – 20 meter dengan kondisi dasar pasir berlumpur.
- Lokasi 3 kapal dalam kondisi perairan keruh karena arus dan dekat dengan muara. Sedangkan 1 kapal dalam kondisi perairan jernih. Biota yang ditemukan antara lain ikan dan soft coral.
- Lokasi Pulau Untung Jawa layak dikembangkan untuk program wisata bahari dan BMKT dengan adanya potensi yang belum tersentuh yaitu 4 (empat) kapal tenggelam.
- Jenis bantuan sarana dan prasarana yang dimintakan mengarah pada kompresor dan peralatan SCUBA yang akan digunakan dalam pengawasan BMKT hingga wisata bahari bawah laut.
- Temuan BMKT yang disimpan oleh masyarakat dapat dilakukan display dengan memberikan keterangan kesejarahan serta deskripsi.



Identifikasi BMKT temuan Nelawan



Gazebo dan warung makan

Identifikasi sarana pengelolaan BMKT di Kab. Bintan

Identifikasi sarana pengelolaan BMKT di Kab. Bintan pada tanggal 28 - 30 Agustus 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- Lokasi Desa Pengudang layak dikembangkan untuk program Bantuan Sarana / Prasarana Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dengan adanya potensi yang belum tersentuh yaitu sisa kapal tenggelam dan muatannya yang ada di Perairan Desa Pengudang untuk menjadi lokasi *insitu* BMKT dan wisata penyelaman kapal tenggelam.
- Kelompok dapat mengembangkan wisata bahari kapal tenggelam yang dapat dipadukan dengan wisata mangrove dan wisata aktivitas masyarakat "*living dan interaction with native culture*".
- Temuan BMKT yang disimpan oleh masyarakat dapat dilakukan display dengan memberikan keterangan kesejarahan serta deskripsi. Keterangan kesejarahan serta deskripsi dapat disinergikan dengan BPK Wilayah 5.



Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Pada Triwulan III Tahun 2023 telah terdapat sebanyak 1 (satu) kawasan BMKT yang dibangun. Namun pada tahun Triwulan III tahun 2024 belum terdapat capaian.

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Capaian Triwulan III tahun 2024 tidak dibandingkan dengan target pada Renstra DJPKRL karena IKU dihitung pada akhir tahun.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab belum tercapainya target pada triwulan ini adalah adanya blokir anggaran hingga akhir triwulan II sehingga menghambat seluruh pelaksanaan kegiatan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan koordinasi intensif secara online dengan dinas, desa, dan kelompok calon penerima serta melakukan survey dan identifikasi lapang berbarengan pada waktu yang sama dengan kegiatan lain.

Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni

a. Stock Opname BMKT pengangkatan Karawang dan Belitung

Kegiatan stock opname dilakukan beberapa kali mengingat banyaknya jumlah BMKT yang terdapat di gudang Cileungsi. Adapun jenis barang yang dilakukan stock opname adalah sebagai berikut: Mangkok, teko, kendi, vas, cermin, buli - buli, guci, piring, tatakan, steam cup, koin dan logam.



Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024:

- 1) Penetapan penerima sarana BMKT
- 2) Stock opname dan penyelesaian status BMKT

3.1.12. IKU 12 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

Definisi:

Persentase Realisasi Anggaran adalah Persentase Capaian Realisasi Anggaran pada suatu unit kerja dibandingkan jumlah Pagu Anggaran yang diberikan.

Teknik Menghitung:

$$X = \frac{R_A}{P_A} \times 100\%$$

Keterangan:

- X = Persentase Penyerapan Anggaran
- R_A = Jumlah Persentasi Pencapaian Realisasi Anggaran
- P_A = Jumlah Pagu Anggaran yang ditetapkan pada Unit Kerja

Tabel 12. Capaian IKU Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 12													
Realisasi TW II Tahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
4,45	8,82%	96,87%	29%	29,5%	116,88	-	95%	-	-	-	-	-	

Target persentase realisasi anggaran Direktorat Jasa Kelautan pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 29% dan tercapai 29,53% atau Rp22.054.003.932,- dari anggaran total Rp74.687.980.000,- maka persentase capaian realisasi adalah sebesar 101,83%, Pada Triwulan III tahun 2023 persentase realisasi anggaran sebesar 20,44% sehingga apabila dibandingkan maka realisasi Triwulan III tahun 2023 lebih tinggi. IKU ini tidak terdapat pada Renstra sehingga tidak dapat dibandingkan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU antara Dengan kondisi 1 DIPA di Direktorat Jenderal PRL, masih diperlukan koordinasi yang baik antara Direktorat sehingga terdapat keterlambatan proses administrasi.

Solusi : Melakukan koordinasi intensif antara pengelola keuangan di masing-masing Direktorat/ Sekretariat Ditjen PKRL.yang dilakukan kedepannya agar lebih efektif penggunaan anggaran

Analisis Sumber Daya penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan dibidang penganggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III antara lain pelaksanaan UP dan TUP, penyelesaian dan monitoring kontrak, pembuatan LPJ bendahara, pembuatan SPM, dan penyelesaian tagihan.

Rencana Aksi Triwulan IV:

1. Pencairan Kontrak yang telah selesai dilaksanakan
2. Pertanggung jawaban Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan

3.1.13. IKU 13 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)

Suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Standar profesionalitas ASN: Kualifikasi, Kompetensi, Disiplin, dan Kinerja.

1. Kualifikasi: Dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau/keahlian khusus (*body of expert knowledge and skills* atau *mastery of theoretical knowledge*), sehingga seseorang

mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya.

2. Kompetensi: Dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan (*continuing competence*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
3. Kinerja: Dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
4. Disiplin: Dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Formula IP ASN

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

Keterangan:

- IP = Indeks Profesionalitas ASN
- IP2 = Indeks Profesionalitas ke-i
- IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)
- IPi = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)
- IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)
- IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)
- W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j
- W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k
- W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l
- W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara secara periodik terhadap capaian Sasaran Kerja Pegawai sehingga terdapat peringatan apabila ada pegawai yang tidak memenuhi kinerja individu. Upaya peningkatan kompetensi ASN didukung dengan adanya penganggaran untuk mengikuti diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, mendorong keaktifan ASN dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelatihan yang relevan dan melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai baik yang terkait masalah administrasi kepegawaian maupun yang berkaitan dengan masalah hukum secara periodik sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai. Dengan meningkatnya indeks profesionalitas ASN secara langsung dapat meningkatkan efisiensi sumberdaya yang ada pada Direktorat Jasa Kelautan, meningkatnya kinerja organisasi, meningkatnya kedisiplinan, dan meningkatnya efisiensi anggaran.

Kegiatan pendukung dalam mencapai IK Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jasa Kelautan antara lain: sosialisasi penyusunan dan pengisian SKP tahun 2024 dalam rangka Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, menyusun usulan kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar, monitoring dan evaluasi secara secara periodik terhadap capaian Sasaran Kinerja Pegawai, keikutsertaan pada diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai, dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 13. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 13		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)											
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW	Realisasi TW	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2024	% Capaian thd target	Target 2024	%Capaianthd target	
	-	81,82					88%	-	88	88	-	-	

Capaian IKU ini pada semesteran sehingga pada triwulan III ini tidak ada target sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023 maupun target rentra.

Analisis Keberhasilan : Keaktifan pegawai mengikuti peningkatan kompetensi pegawai melalui Seminar, workshop, bimtek , sosialisasi, dan dialog kinerja. (contoh, sosialisasi kompetensi pegawai terkait Kawasan, jenis dan arsiparis)

Kendala: Masih ada pegawai yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

Solusi: Mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk menginput sertifikat pada aplikasi e-pegawai.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya: Dalam rangka penggunaan sumberdaya, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada Direktorat Jasa Kelautan , Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Kegiatan Pendukung:

Adanya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang diikuti oleh pegawai lingkup Direktorat Jasa Kelautan

Rencana Aksi:

1. Adanya pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai Direktorat Jasa Kelautan
2. Peningkatan Etos Kerja Pegawai di Lingkup Direktorat Jasa Kelautan

3.1.14. IKU 14 Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak Tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017.

Pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan kinerja yang mendorong kita untuk

1. meningkatkan kinerja agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya berjalan dengan baik dan agar manfaat betul-betul dirasakan;
2. meningkatkan hubungan yang saling terkait pada kinerja individu, organisasi dan pembangunan; dan
3. menciptakan kerja yang lebih kolaboratif dan dinamis seiring dengan adanya transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu.

Pada tahun 2021, terdapat peraturan baru Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%),

pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Keberhasilan capaian IKU PM SAKIP didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPRL.

Tabel 14. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai)

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 14		Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
-	81	Penilaian dilakukan Tahunan					81	-	81	-	-	-	

Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP dinilai tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun lalu, Renstra KKP, maupun Renstra DJPRL.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu dilakukan rapat internal secara rutin di kantor ataupun melalui daring dengan melibatkan Tim Kinerja Direktorat Jasa Kelautan untuk mengakselerasi capaian kinerja setiap Triwulan agar nilai NPSS sesuai target. Beberapa kegiatan pendukung antara lain penyiapan dokumen dan data dukung penilaian kinerja baik dan lengkap sesuai format yang ditentukan, peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SAKIP-LAKIP, mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja, serta pengelolaan arsip secara digital.

Analisis Keberhasilan: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan, dan (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)"

Kendala: Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: (1). Adanya keterbatasan dokumen untuk penilaian indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)", dan (2). Tidak seluruh staf di Eselon 2 mengetahui penilaian indikator ini.

Solusi: Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: (1). Mengupayakan ketersediaan dokumen untuk penilaian indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)", dan (2). Perlu dilakukan sosialisasi untuk indikator ini sehingga setiap staf dapat membantu dalam penilaian.

Kegiatan yang mendukung capaian Nilai PM SAKIP Direktorat Jasa Kelautan antara lain:

- i. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja di Lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2024.

ii. Penyusunan Renstra Teknokratik DJPKRL Tahun 2025-2029

Rencana Aksi Triwulan IV:

1. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Penilaian AKIP

3.1.15. IKU 15 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di lingkup KKP, penyelenggaraan SPIP diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL.

Pencapaian IK didukung oleh kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan Direktorat Jasa Kelautan tahun 2023. Pengendalian resiko kegiatan pada Direktorat Jasa Kelautan disusun berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk menjadi bahan antisipasi dan masukan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Tabel 15. Capaian IKU Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 15		Laporan SPIP yang disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (dokumen)											
RealisasiTahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan td Tahun 2023	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2024	% Capaian thd target	Target 2024	%Capaianthd target	
4	4	4	3	3	100	-	4	-	4	-	-	-	

Capaian IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Jasa Kelautan setiap Triwulan. Hingga Triwulan III tersusun 3 dokumen laporan SPIP atau 100%. Capaian IKU ini pada Triwulan III tahun 2024 sama dengan capaian pada Triwulan III tahun 2023 dan IKU tidak terdapat dalam renstra sehingga tidak dapat dibandingkan.

Pencapaian IK didukung oleh kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan Direktorat Jasa Kelautan tahun 2024. Pengendalian resiko kegiatan pada Direktorat Jasa Kelautan disusun berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk menjadi bahan antisipasi dan masukan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Keberhasilan indikator ini kedepan akan didukung dengan adanya Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup Direktorat Jasa Kelautan dan selalu berkoordinasi dengan Satgas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan dievaluasi

oleh Inspektorat, Direktorat Jasa Kelautan telah mengoordinasikan pengumpulan dan pembinaan SPIP serta penyusunan laporan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kendala dokumen data dukung yang belum lengkap saat evaluasi oleh Inspektorat.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia karena pelaksanaan SPIP ini melibatkan ASN DJPRL. Kegiatan yang dilakukan guna mendukung SPIP antara lain: Penyusunan dan Pemantauan Manajemen Resiko, Peningkatan kapasitas terkait SPIP, Penyusunan Laporan SPIP, dan Penilaian SPIP

Kegiatan Pendukung:

1. Pemantauan kegiatan pengendalian pada Direktorat Jasa Kelautan,
2. Menyusun form pemantauan manajemen risiko

Rencana Aksi :

1. Pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut evaluasi manajemen risiko
2. Menyusun laporan SPIP triwulan IV tahun 2024

3.1.16. IKU 16 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indicator ini berasal dari penilaian Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*.

Cara perhitungan capaian

Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Keaktifan :

$\frac{\text{Jumlah Nilai Pencapaian pegawai yang wajib ikut serta/bergabung}}{\text{Jumlah Target Pegawai yang wajib ikut serta/bergabung}} \times 100\%$

Tabel 16. Capaian IKU Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 16		Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)											
RealisasiTahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2021	2022	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2024	% Capaian thd target	Target 2024	%Capaianthd target	
100	100	100	94	133,33	120	+33,33%	9	133,33% atau 120%	94	100	90	100	

								(kinerjaku)				
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--

Capaian IK ini diukur setiap triwulan dengan target pada triwulan III sebesar 94% dengan realisasi sebesar 133,33% atau 120% dari target. Apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III tahun 2023 yang sebesar 100% maka capaian Triwulan III tahun 2024 ini lebih besar 33,33%.

Faktor keberhasilan pencapaian IKU ini adalah keaktifan sharing informasi oleh Direktur Jasa Kelautan ke dalam aplikasi pada portal.kkp.go.id.

Kendala: (1). Belum sepenuhnya memenuhi dokumen yang disyaratkan untuk penilaian IK ini

Solusi: Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: (1). Meningkatkan peran serta dan keaktifan para pejabat dan pelaksana terkait dalam menginput informasi dan hal-hal terkait lainnya ke dalam aplikasi portal.kkp.go.id, (2). Memenuhi dokumen yang disyaratkan untuk penilaian IK ini.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dilaksanakan melalui keikutsertaan dan keaktifan para pejabat dan pelaksana terkait di Direktorat Jasa Kelautan dalam menginput informasi kegiatan dan hal-hal terkait lainnya ke dalam aplikasi yang mudah digunakan yaitu aplikasi portal tanpa perlu mengeluarkan anggaran untuk mengadakan pelatihan.

Kegiatan Pendukung:

Keaktifan Direktur Jasa Kelautan dalam kontribusi pemenuhan informasi dan konten pada portal KKP.

Rencana Aksi Triwulan IV:

Memaksimalkan keaktifan Direktur Jasa Kelautan untuk pemenuhan informasi dan konten pada portal KKP.

3.1.17. IKU 17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Dit. Jasa Kelautan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Dit. Jasa Kelautan yang menjadi objek pengawasan.

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

Σ Nt = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Dit. Jasa Kelautan

ΣN = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Dit. Jasa Kelautan

Tabel 17. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 17		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2023		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
100	100	95,74	80	87,8	109,75	14,1	80	120	80	-	80	100	

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan tahun pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 87,8% dengan target 80,00% atau sebesar 109,75%. Apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III tahun 2023 yang sebesar 95,65% maka capaian Triwulan III tahun 2024 adalah lebih tinggi sebesar 14,1%. Jika dibandingkan dengan target renstra melebihi sebesar 29,75%.

Terdapat efisiensi pengguna sumberdaya yaitu dengan aktif memonitor aplikasi SIDAK dan aktif mengikuti pertemuan dalam rangka pembahasan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan sehingga rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti. Penyelesaian rekomendasi melibatkan Koordinator terkait yang memahami substansi rekomendasi yang harus diselesaikan.

Kendala : adanya faktor eksternal dalam menyelesaikan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan ini.

Solusi : Koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian dokumen hasil pengawasan ini.

Kegiatan pendukung pencapaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan antara lain mengikuti rapat pembahasan yang diadakan oleh Setditjen PRL dan Inspektorat Jenderal tentang penyelesaian hasil rekomendasi. Disamping itu juga melakukan rapat internal Direktorat untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi yang ada pada aplikasi SIDAK.

3.1.18. IKU 18 Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat Jasa Kelautan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Teknik menghitung Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan atas Laporan Keuangan. Temuan LHP BPK Direktorat Jasa Kelautan yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2022 adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit Jaskel yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit Jaskel}} \times 100\%$$

Tabel 18. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 18		Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)											
RealisasiTahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi ebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2024	% Capaian thd target	Target 2024	%Capaianthd target	
100	100	Perhitungan dilakukan Tahunan					100	-	100	100	100	100	

Perhitungan persentase penyelesaian temuan dilakukan tahunan sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan Renstra.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya komitmen, kepedulian, dan tanggung jawab yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk berupaya memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan dan optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja Direktorat Jasa Kelautan.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu pelibatan aktif seluruh pegawai Direktorat Jasa Kelautan dalam penyelesaian temuan mulai dari staf teknis sampai staf administrasi dan keuangan. Kegiatan pendukung untuk mencapai IK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Direktorat Jasa Kelautan antara lain melakukan pertemuan internal untuk membahas penyelesaian temuan, melakukan koordinasi dengan Setditjen PRL dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Kendala : Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Temuan lingkup Direktorat Jasa Kelautan”, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu temuan yang disampaikan dalam penyelesaiannya tidak melibatkan seluruh staf dan koordinator.

Solusi : Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu : Penyelesaian temuan harus melibatkan semua koordinator lingkup.

Kegiatan pendukung pencapaian kinerja ini dengan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan BPK pada saat reviu dan sesudah reviu.

3.1.19. IKU 19 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

Indikator kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.

- Inquiring (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

- Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
- Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
- Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Formula penilaian:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).

Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PRL merupakan indikator kinerja baru sebagai implementasi dari penyaluran bantuan pemerintah lingkup Ditjen PRL yang dinyatakan dalam satuan persen (%). Nilai Kesesuaian merupakan suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi penyaluran bantuan pemerintah oleh Ditjen PRL untuk pemerintah daerah atau masyarakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pemerintah berdasarkan kesesuaian kebutuhan, sasaran, kontrak (spesifikasi, jumlah, dan waktu), dan infrastruktur pendukung.

Tabel 19. Capaian IKU Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 19		Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
100	100	Perhitungan periode Tahunan					100	-	-	-	-	-	-

Capaian Indikator Kinerja ini dihitung tahunan sehingga triwulan III ini belum ada capaian dan belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu maupun renstra.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian IK ini yaitu tersalurkannya bantuan pemerintah yang telah diberikan kepada kelompok masyarakat dan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pendapatan mereka. Bantuan yang diberikan dalam kondisi baik karena dipelihara

dan dijaga, terdapat pencatatan secara rutin, terdapat penambahan alat atau barang untuk menunjang penggunaan bantuan serta mampu memberikan dampak positif bagi kelompok penerima.

Efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu pelibatan aktif kelompok penerima dan Dinas Perikanan setempat dalam proses penyaluran bantuan, monitoring penggunaan bantuan, dan penambahan peralatan yang diperlukan dalam mendukung operasional pemanfaatan bantuan pemerintah. Kegiatan pendukung antara lain monitoring dari Direktorat Jasa Kelautan dan Dinas perikanan melalui Penyuluh Perikanan dalam proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan. Pemberian bimbingan teknis dan pendampingan intensif kepada kelompok penerima bantuan tentang bagaimana cara memanfaatkan bantuan yang diberikan.

Kendala : Masih kurangnya kesadaran dari penerima bantuan untuk membuat dan mengirimkan laporan pemanfaatan secara berkala.

Solusi : harus aktif mengingatkan agar penerima bantuan untuk membuat dan mengirimkan laporan secara berkala.

3.1.20. IKU 20 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Teknik menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Jasa Kelautan akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Jasa Kelautan merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a. Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Penciptaan Arsip
 - Penggunaan Arsip
 - Pemeliharaan Arsip
 - Penyusutan ArsipDengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
 - b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Sumberdaya Manusia Kearsipan
 - Sarana dan Prasarana KearsipanDengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 202. Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)

SS 11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan			
IKU – 20				
Realisasi Tahun	Tahun 2024	Tahun 2024	Renstra DJPRL2020-2024	Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)

2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2024	% Capaian thd target	Target 2024	%Capaianthd target
-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-

Capaian IKU dihitung tahunan sehingga triwulan II ini belum ada capaian, IKU ini merupakan IKU baru ditahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tidak terdapat dalam renstra.

Analisis keberhasilan: Koordinasi kearsipan telah terbentuk dengan dilakukannya tim arsip yang sudah di SK-kan di Tingkat Kementerian dan penugasan di lingkup Ditjen PKRL.

Kendala: Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu : tidak seluruh staf di Direktorat Jasa Kelautan mengetahui indikator ini.

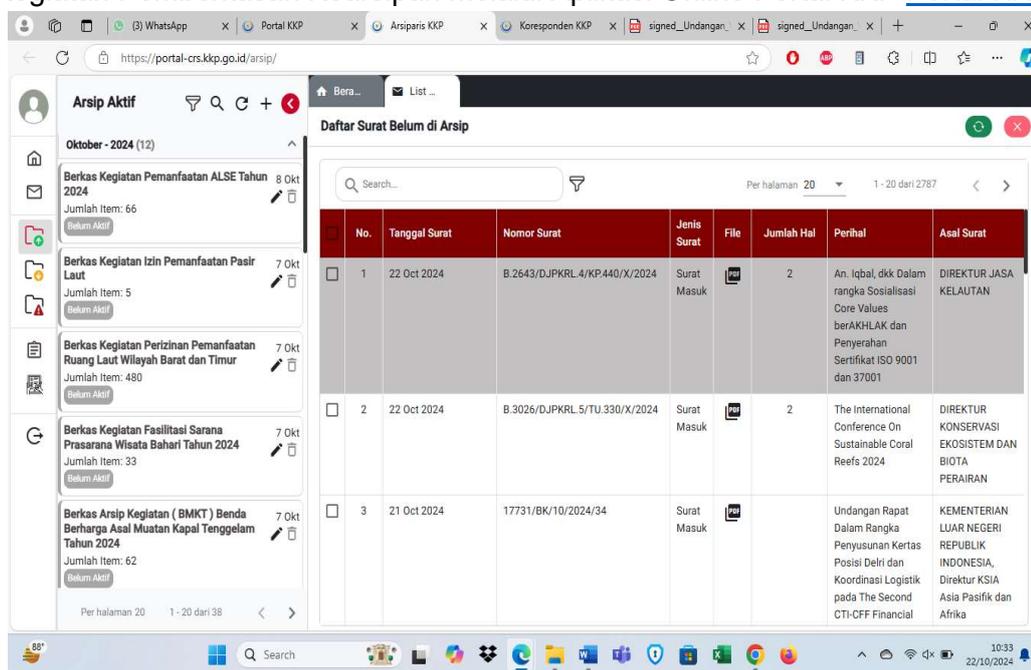
Solusi: Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: hasil pengawasan kearsipan sebaiknya disampaikan kesetiap staf dan koordinator sebagai informasi dan Batasan dalam pelaksanaan kegiatan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya: Direktorat Jasa Kelautan memiliki sumberdaya manusia arsiparis sebanyak 2 orang yaitu arsiparis ahli pertama dan terampil.

Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kegiatan Arsiparis, antara lain:

- 1) Kegiatan Pemberkasan Kearsipan melalui Aplikasi Online Portal KKP [Portal KKP](#)



- 2) Kegiatan Rapat Koordinasi Kearsipan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Selasa-Kamis, 2-4 Juli 2024 di Bandung yang dihadiri oleh Seluruh Arsiparis dan Pengelola Persuratan lingkup KKP



3) Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal KKP Tahun 2024

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengawal kepatuhan penyelenggaraan kearsipan pada setiap pencipta arsip terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan sehingga mewujudkan sasaran strategis pembangunan kearsipan nasional yaitu Tertib Arsip, Transformasi Digital dan Memori Kolektif Bangsa.

Sasaran dan fokus pengawasan kearsipan adalah memastikan implementasi kebijakan kearsipan dengan indikator keberhasilan capaian adalah ketersediaan arsip aktif pada unit pengolah, arsip inaktif pada unit kearsipan dan arsip statis pada lembaga kearsipan.

Pengawasan kearsipan juga sangat penting untuk menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan yaitu dari Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan.

Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pada Pengawasan Kearsipan ini antara lain :

- a. Kegiatan Pembahasan Hasil Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal KKP Lingkup Kantor Pusat. Dilaksanakan pada Rabu, 17 Juli 2024 di Ruang Rapat Arwana Lt 14 GMB II
- b. Kegiatan Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup UPT Tahap I Tahun 2024 bersama seluruh Tim Penilai Internal KKP yang dilaksanakan pada Selasa – Jumat, 23-26 Juli 2024 di Semarang Jawa Tengah.



c. Kegiatan Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup UPT Tahap II Tahun 2024 bersama seluruh Tim Penilai Internal KKP yang dilaksanakan pada Selasa – Jumat, 7-9 Agustus 2024 di Purwakarta Jawa Barat.



d. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Persuratan dan Kearsipan dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan terhadap UPT KKP lingkup Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada tanggal 18-21 September 2024 di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara



4) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Lingkup DJPKRL

Maksud dan tujuan dari kegiatan Bimbingan Teknis adalah

1. Mendorong terciptanya tata naskah dinas yang sesuai dengan Permen KP Nomor 42 Tahun 2022
2. Mengidentifikasi arsip yang tercipta sesuai dengan kode klasifikasi Permen KP Nomor 9 Tahun 2021
3. Menilai Efektivitas Sistem Kearsipan:
4. Memastikan Ketersediaan dan Keandalan Informasi:
5. Menjamin penyimpanan arsip vital.

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan ini mengangkat tema “*Archive is a new weapon*” (arsip adalah senjata baru) istilah ini disampaikan oleh Penasihat Ahli Bidang Kemaritiman dan Pertahanan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Connie Rahakundini Bakrie. Ungkapan “arsip adalah senjata baru” sering digunakan untuk menekankan pentingnya arsip dalam berbagai konteks, seperti sejarah, hukum dan administrasi. Untuk itu kami ingin mengangkat tema tersebut karena arsip yang tercipta di lingkup Ditjen PKRL lebih dari 50% dengan Jadwal Retensi Arsip Permanen serta ada sebagian berpotensi sebagai arsip terjaga.

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 60 orang yang terdiri dari arsiparis lingkup Ditjen PKRL, pengelola kearsipan, perwakilan Tim Kerja Setditjen PKRL, perwakilan tim teknis dari timja direktorat, Tim Kerja Dukungan Manajemen dan perwakilan dinas setempat.

Materi kegiatan Bimtek Kearsipan ini adalah:

1. Pre-Test (Kuis)
2. Penciptaan Arsip Internal KKP
3. Pengelolaan Arsip Dinamis
4. Pemberkasan Arsip Konvensional / Fisik

5. Pemberkasan Arsip Elektronik
6. Penyusutan Arsip (Usul musnah dan usul serah)
7. Field Trip ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Post Test.

Selain materi yang diberikan, ada penghargaan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui Sekretaris Ditjen PKRL dalam Pengawasan Kearsipan Internal lingkup DJPKRL dan Direktorat Jasa Kelautan mendapatkan Penghargaan Terbaik Pusat.

Kegiatan tersebut adalah :

- a. Kegiatan Persiapan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan lingkup DJPKRL yang dilaksanakan pada Senin, 2 September 2024 di Ruang Rapat Ndana Lt 9 GMB III.
- b. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Lingkup DJPKRL yang dilaksanakan Rabu-Minggu, 11-15 September 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta.





- 5) Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Srikandi dilaksanakan secara daring pada Senin, 30 September 2024 oleh Biro Umum dan PBJKegiatan Pemberkasan Kearsipan offline Secara Rutin yang dilaksanakan oleh Arsiparis se-DJPKRL di Petojo, Jakarta.
 - 6) Melakukan pengumpulan data arsip vital dan membuat daftar arsip vital
 - 7) Membuat Daftar Arsip Inaktif dari Penataan Arsip-Arsip Tekstual yang ada di kantor.
- Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
- 1) Melakukan Pemberkasan Kearsipan melalui Aplikasi Online Portal KKP
 - 2) Membuat Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas untuk Arsip Tekstual.
 - 3) Mendata Arsip Terjaga untuk Direktorat Jasa Kelautan
 - 4) Mendata Arsip Aktif dan Arsip Inaktif.
 - 5) Melakukan Pemindahan Arsip Inaktif

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran, secara keseluruhan serapan anggaran kegiatan Direktorat Jasa Kelautan hingga triwulan III Tahun 2024 adalah **Rp22.054.003.932,-** dari total anggaran **Rp74.687.980.000,-** atau sebesar **(29,53%)**.

BAB IV PENUTUP

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 20243 terdapat 20 indikator yang terdiri dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 9 Indikator Kinerja (IK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan pengukuran kinerja Direktorat Jasa Kelautan pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>, pada Triwulan III semua target IKU dan IK telah mencapai target yang telah ditentukan seperti :

5. IKU 12 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 29% tercapai 29,53% atau sebesar 101,83%,

6. IKU 15 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 3 dokumen tercapai 3 dokumen atau sebesar 100%,
7. IKU 16 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dengan target 94% tercapai 133,33% atau sebesar 120%,
8. IKU 17 Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan dengan target 80% tercapai 87,8% atau sebesar 109,75%.

Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Tahun 2024

Tindak Lanjut rekomendasi Laporan Kinerja tahun 2024 terdapat pada table berikut:

Tabel 23 Tindak Lanjut atas rekomendasi dari Laporan Kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2024

No	Rekomendasi LKJ Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2024	Tindak Lanjut yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024
1.	Peningkatan realisasi anggaran dan kegiatan dilingkup Direktorat Jasa Kelautan	Telah naiknya jumlah realisasi anggaran dan kegiatan
2.	Rapat percepatan kegiatan kontraktual dilingkup Direktorat Jasa Kelautan,	Telah mulainya pelaksanaan kontrak pekerjaan

Rekomendasi Triwulan berikutnya:

1. Peningkatan realisasi anggaran dan kegiatan dilingkup Direktorat Jasa Kelautan,
2. Percepatan Penyelesaian kegiatan kontraktual dilingkup Direktorat Jasa Kelautan,

Lampiran